

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MESIR PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDUL FATTAH EL SISI**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RIFDAH HALIMAH PINARDI

21323116

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MESIR PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDUL FATTAH EL SISI
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RIFDAH HALIMAH PINARDI

21323116

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Kekerasan terhadap Perempuan Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden

Abdul Fattah El Sisi

SKRIPSI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

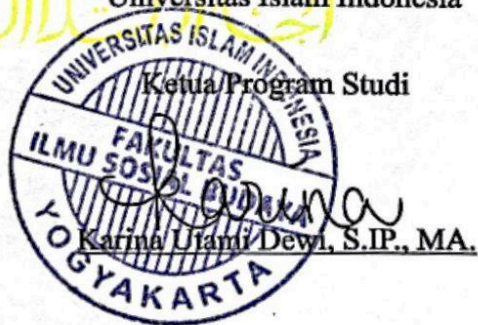
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
15 Agustus 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

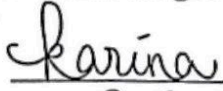
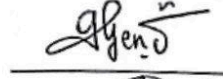

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.IP., MA.
- 2 Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.
- 3 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025



Rifdah Halimah Pinardi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>15</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>16</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 ANALISIS KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN MESIR	18
2.1. Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Mesir Berdasarkan Aspek Agama	18
2.2 Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Mesir Berdasarkan Aspek Ideologi	23
2.3 Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Mesir Berdasarkan Aspek Bahasa	30
BAB 3 ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN KEKERASAN LANGSUNG TERHADAP PEREMPUAN MESIR	34
3.1 Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan Mesir	36
<i>3.1.1 Kekerasan Struktural yang Membahayakan Well-being Needs</i>	<i>37</i>
<i>3.1.2 Kekerasan Struktural yang Membahayakan Identity Needs</i>	<i>42</i>
<i>3.1.3 Kekerasan Struktural yang Membahayakan Freedom Needs</i>	<i>46</i>
3.2 Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan Mesir	49
<i>3.2.1 Kekerasan Langsung yang Membahayakan Survival Needs</i>	<i>51</i>
<i>3.2.2 Kekerasan Langsung Well-being Needs</i>	<i>52</i>

3.2.3 <i>Kekerasan Langsung Freedom Needs</i>	54
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Rekomendasi	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tipologi Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung	12
Tabel 2. Dikotomi Yang Terpilih dan Tidak terpilih	19
Tabel 3. Tipologi Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan di Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden El-sisi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung	11
Gambar 2. Bentuk Segitiga Kekerasan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden El-sisi	60

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan di Mesir masih menjadi persoalan serius meskipun telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Sejak pemerintahan dari Presiden Abdul Fattah El-Sisi mengambil alih kepemimpinan di Mesir pada tahun 2014 hingga tahun 2024, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Mesir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penelitian ini menganalisis kekerasan terhadap para perempuan Mesir di bawah kepemimpinan Presiden El-Sisi dilakukan melalui teori segitiga kekerasan oleh Johan Galtung, kekerasan terhadap perempuan Mesir dibagi menjadi 3 jenis, kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berargumen kekerasan terhadap perempuan Mesir berakar dari kekerasan kultural berbentuk miskonsepsi hukum syariah islam yang diperkuat oleh otoritarianisme pada rezim El-sisi serta penggunaan bahasa yang bias gender. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa buruknya implementasi hukum perlindungan perempuan serta pengekanan melalui norma kehormatan yang mengakar dalam standar moralitas perempuan, menjadi bentuk dari kekerasan struktural terhadap perempuan Mesir. Sementara itu, maraknya praktik kekerasan fisik terhadap perempuan seperti pembunuhan demi kehormatan, *female genital mutilation*, dan kriminalisasi aktivis perempuan menjadi bentuk dari kekerasan langsung yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden El-sisi. Sejalan dengan teori segitiga kekerasan, dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis kekerasan yang terjadi saling berkesinambungan dan saling memperkuat antara satu dengan yang lain.

Kata-kata kunci: Perempuan Mesir, Kekerasan berbasis gender, Segitiga kekerasan, Presiden Abdul Fattah El-sisi

ABSTRACT

Violence against women in Egypt remains a serious concern despite the country's ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). From the beginning of President Abdel Fattah El-Sisi's rule in 2014 until 2024, gender-based violence against Egyptian women has shown no significant decline. This study analyzes such violence under El-Sisi's leadership through Johan Galtung's violence triangle theory, which categorizes violence into three forms: cultural, structural, and direct. Within this framework, the study argues that violence against Egyptian women is rooted in cultural violence, particularly the misinterpretation of Islamic sharia law, reinforced by authoritarianism and gender-biased language. The findings reveal that weak implementation of protective laws, combined with the enforcement of honor norms embedded in patriarchal moral standards, constitute structural violence. Meanwhile, the persistence of honor killings, female genital mutilation, and the criminalization of women activists represents direct violence. In line with the violence triangle theory, this study concludes that these three forms of violence are interconnected and mutually reinforcing within Egypt's sociopolitical order.

Keywords: *Egyptian women, Gender-based violence, triangle violence, President Abdel Fattah El-Sisi.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan seringkali dipahami secara keliru sebagai sebuah tindakan yang mengancam perempuan hanya secara fisik, padahal kekerasan terhadap perempuan juga mencakup aspek yang lebih luas terkait dengan hak perempuan untuk menjalankan perannya secara penuh di masyarakat. Oleh karena itu kekerasan terhadap perempuan juga dapat dipahami sebagai sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan. *United Nations* sendiri melalui *Declaration on the Elimination of Violence against Women* pada 1993 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai segala tindak kekerasan berbasis gender yang dapat mengancam perempuan secara fisik, psikologis maupun seksual, termasuk tindakan mengancam yang memaksa ataupun merampas kebebasan dari perempuan, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (United Nation, n.d.).

Kekerasaan terhadap perempuan dapat membuat perempuan terjebak pada kondisi yang sangat fatal, sehingga saat ini telah menyita perhatian global. Tindak kekerasan fisik terhadap perempuan dapat menyebabkan fatalitas, sedangkan tindak kekerasan psikis dan ekonomi terhadap perempuan dapat menyebabkan kerusakan mental yang berujung pada upaya bunuh diri (Anwar 2023). Melihat kondisi fatal yang dapat disebabkan oleh kekerasan terhadap perempuan, masyarakat global pada tahun 1967 mendeklarasikan hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, yang kemudian disepakati sebagai

hukum internasional pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* tahun 1979 (Herawati dkk. 2021, 687).

Di Mesir kekerasan terhadap perempuan sudah sejak lama terjadi, baik itu kekerasan secara fisik yang dapat terlihat secara langsung maupun kekerasan yang terjadi secara struktural memberikan ketidakadilan bagi perempuan Mesir. Mesir kemudian mifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* pada September 1991, setelah sebelumnya disepakati pada Keputusan Republik No. 1980. 431 Tahun 1981 (Afriandi dkk. 2022, 16). Meskipun telah meratifikasi CEDAW, permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan pada masa tersebut masih belum dapat terselesaikan.

Tiga kasus pemerkosaan yang terjadi pada awal masa Pemerintahan Presiden Mubarak menciptakan konstruksi sosial yang memperburuk kondisi kebebasan para Perempuan Mesir dengan mengatasnamakan keamanan diri hingga masa kini. Konstruksi sosial yang terbentuk kemudian menormalisasi citra perempuan Mesir di ruang publik, khususnya yang tidak berjilbab dan tidak menutup diri dengan cadar, sebagai perempuan yang tidak bermoral, tidak terhormat, atau bahkan pelacur sehingga kekerasan yang terjadi terhadap mereka dapat diterima dan mereka yang menjadi korban harus menanggung malu atas kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan mereka yang tidak bermoral. Para perempuan Mesir kemudian mulai berpakaian dengan lebih konservatif hingga bahkan banyak yang mulai menggunakan cadar untuk menghindari terjadinya kekerasan (Zakariya 2019a, 4).

Pada saat Revolusi Mesir yang diwarnai penggulingan kekuasaan dari Presiden Mubarak hingga Presiden Mohamed Morsi terjadi, para perempuan

Mesir turut mengambil peran sebagai revolusioner sekaligus aktivis gender yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan Mesir. Para revolusioner perempuan memainkan peran penting dalam menghadapi kebrutalan polisi secara langsung, memobilisasi pengunjuk rasa, hingga mengamankan lokasi di Lapangan Tahrir di mana mereka berkemah bersama kelompok pengunjuk rasa lainnya (Saad dan Abed 2020, 87).

Pada masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi yang sudah berjalan sejak 2014, kekerasan terhadap perempuan Mesir digunakan sebagai alat intimidasi yang berfungsi untuk mengontrol perempuan dan menghalangi perempuan dalam mendapatkan haknya masih berlanjut hingga saat ini. Pemerintahan dari Presiden El-sisi yang otoriter menggunakan konsep norma kekeluargaan Mesir yang didalamnya terkandung nilai moral terkait kehormatan kehormatan perempuan sebagai kehormatan bangsa. Dari sana kehormatan dan kesucian dari perempuan Mesir dianggap sebagai martabat bangsa yang menjadi tanggung jawab bersama (Nagel 1998, 256).

Kehormatan perempuan Mesir yang dikaitkan dengan peran perempuan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat menciptakan ketimpangan yang memposisikan perempuan ke dalam strata yang lebih rendah dari laki-laki. Kehadiran strata dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat antara perempuan dan laki-laki kemudian menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan Mesir seringkali dianggap sebagai hal yang sepele karena menjadi salah satu bentuk demonstrasi kuasa laki-laki terhadap perempuan (Zakarriya 2019b, 119).

Strata yang timpang antara laki-laki dan perempuan Mesir sudah dapat

terlihat pada penurunan peringkat Mesir dari global gender gap index di tahun pertama masa kepemimpinan Presiden El-sisi. Global gender gap index 2014 menunjukkan Mesir berada pada peringkat 129 dari 142 negara (World Economic Forum 2014, 9) dan turun ke peringkat 136 dari 145 negara pada tahun 2015 (World Economic Forum 2015, 9).

Sejak penurunan peringkat pada tahun pertama masa kepemimpinan Presiden El-sisi, ketimpangan gender di Mesir kemudian berada dalam kondisi yang stagnan bahkan mengalami penurunan. Stagnasi ketimpangan gender di Mesir dapat terlihat pada peringkat Mesir global gender gap index dari tahun ketahun sejak 2015. Pada global gender gap index 2018 Mesir berada pada peringkat 135 dari 149 negara (World Economic Forum 2018, 11). Global gender gap index 2024 menunjukkan Mesir berada pada peringkat 135 dari 146 negara (World Economic Forum 2024, 12). Sementara itu, pada global gender gap index 2025 yang memuat data dari akhir tahun 2024, Mesir mengalami penurunan peringkat ke peringkat 139 dari 148 negara (World Economic Forum 2025, 13).

Ketimpangan gender yang terjadi antara perempuan dan laki-laki di Mesir hadir secara beriringan dengan kerentanan perempuan Mesir terhadap kekerasan. Selain ketimpangan gender yang tidak mengalami perubahan yang signifikan pada masa pemerintahan Presiden El-sisi, angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Mesir juga mengalami stagnasi yang sama. Tidak terjadinya perubahan yang signifikan dari kekerasan terhadap perempuan di Mesir dapat terlihat melalui data statistik kekerasan yang terjadi pada perempuan Mesir. Pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 30% perempuan Mesir telah mengalami kekerasan (UNFPA 2016, 120). Sementara itu, pada tahun 2021 angka kasus kekerasan terhadap

perempuan mesir meningkat sebanyak 1% menjadi 31% (Arab Republic of Egypt 2022, 33).

Pada masa pemerintahan El-sisi yang otoriter, kekerasan terhadap perempuan kerap kali dijadikan sebagai alat pengontrol perempuan untuk memperkuat kestabilan rezim dari Presiden El-sisi. Kestabilan rezim yang terjadi kemudian diharapkan dapat melanggengkan kekuasaan dari rezim yang otoriter (Reich 2023, 22). Penangkapan Amal Fathy pada Mei 2018 merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender di Mesir yang digunakan sebagai alat pengontrol kuasa terhadap perempuan. Fathy ditangkap di rumahnya di Kairo usai mengunggah video di mana ia menceritakan pengalaman pelecehan seksual yang baru saja dialaminya ketika mengunjungi sebuah bank (Amnesty International 2022).

Sehari sebelum penangkapannya, Fathy mengunggah video yang menceritakan pengalamannya dilecehkan dan mengkritik Pemerintah karena telah gagal dalam melindungi perempuan mesir dari kekerasan seksual. Karena video tersebut Fathy kemudian didakwa telah menyebarkan hoax dan *insulting public decency* (Michaelson 2018). Kendati demikian, kritik yang disampaikan Fathy terhadap Pemerintah Mesir merupakan kritik yang mendasar pada Konstitusi Mesir mengenai hak dari perempuan Mesir. Pasal 11 Konstitusi Mesir Tahun 2014 yang menjamin hak dari para perempuan Mesir menyampaikan bahwasannya, Negara berkomitmen untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, serta menjamin pemberdayaan perempuan agar mereka dapat menyeimbangkan peran sebagai anggota keluarga dengan tuntutan pekerjaan (Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, art. 11).

Berdasarkan pemaparan diatas, para Perempuan Mesir hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam kekerasan berbasis gender terutama dalam perlindungan hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai analisis kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi dengan berdasar pada tinjauan segitiga kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan pemahaman terkait urgensi dari pemenuhan hak terhadap perempuan, sehingga nantinya dapat tercipta lingkungan sosial dimana tidak ada lagi marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan segitiga kekerasan pada perempuan Mesir di Masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi.
2. Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai apa saja dampak yang telah disebabkan oleh kekerasan yang terjadi terhadap perempuan Mesir sehingga membuat para perempuan Mesir berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

3. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui mengenai bagaimana dinamika kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Mesir dapat didefinisikan melalui teori tiga konsep kekerasan yang dipaparkan Johan Galtung.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian mengenai Kekerasan terhadap Perempuan Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi berfokus pada kekerasan yang diakibatkan oleh ketidak setaraan gender. Posisi Mesir yang berada pada peringkat 135 dari 146 negara pada global gender gap index 2024 (World Economic Forum 2024, 12) dan bahkan turun pada 2025 ke peringkat 139 dari 148 negara (World Economic Forum 2025, 13), mendorong penulis memilih Mesir sebagai tempat dari objek penelitian yang akan dilakukan. Selain itu tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Mesir, seperti praktik *Female Genital mutilation* yang hampir tidak mengalami penurunan di bawah Kepemimpinan Presiden Abdul Fattah El-sisi menjadi alasan masa Pemerintahan Presiden El-Sisi di pilih. Padahal masa Pemerintahan Presiden El-sisi dimulai setelah para perempuan Mesir berpartisipasi dalam melakukan revolusi dalam rangka menegakkan hak-hak mereka pada 2011 hingga 2014. Agar data pendukung mengenai Pemerintahan Presiden El-Sisi dapat didapatkan, tahun 2014 hingga tahun 2024 menjadi masa Pemerintahan El-Sisi yang dipilih untuk penulis teliti.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai dinamika kekerasan struktural terhadap perempuan Mesir. Penelitian pertama dituliskan oleh Jihan Zakarriya dengan judul *Vulnerability, resistance and sexuality in revolutionary Egypt*, memaparkan mengenai dinamika kekerasan terhadap perempuan Mesir yang terjadi dari masa ke masa. Kegagalan transisi demokrasi masih menjadi momok utama bagi Pemerintah Mesir dari masa ke masa dalam memenuhi hak-hak perempuan. Meskipun begitu pada era setelah revolusi 2011 kekerasan terhadap perempuan kembali digunakan untuk menjalankan Pemerintahan yang otoriter. Rezim El-Sisi sendiri melakukan pembatasan dan bahkan mencemarkan nama baik terhadap organisasi-organisasi sipil dengan melabeli kegiatannya sebagai kegiatan ilegal (Zakarriya 2019).

Selanjutnya penelitian yang kedua dituliskan oleh Nqobizwe Mvelo Ngema dengan judul *Regulation of Adultery (Zina) in the Context of Egyptian Human Rights Obligations*, memaparkan mengenai perbandingan antara bagaimana hukum syariah Islam mengatur hukuman untuk perbuatan zinah dan bagaimana hukum pidana Mesir mengatur hukuman untuk perbuatan zinah. Hukum syariah Islam secara jelas memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara dalam mengatur hukuman untuk perzinahan. Namun, KUHP Mesir menunjukkan bias terhadap laki-laki. Seorang perempuan yang terbukti bersalah melakukan perzinahan dapat dipenjara hingga dua tahun, sementara seorang laki-laki yang bersalah atas kejahatan yang sama dapat dipenjara hanya hingga enam bulan. Praktik diskriminatif ini bukan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam,

melainkan mencerminkan agenda tersembunyi untuk mempromosikan patriarki dengan kedok menegakkan ajaran agama (Ngema 2023, 260).

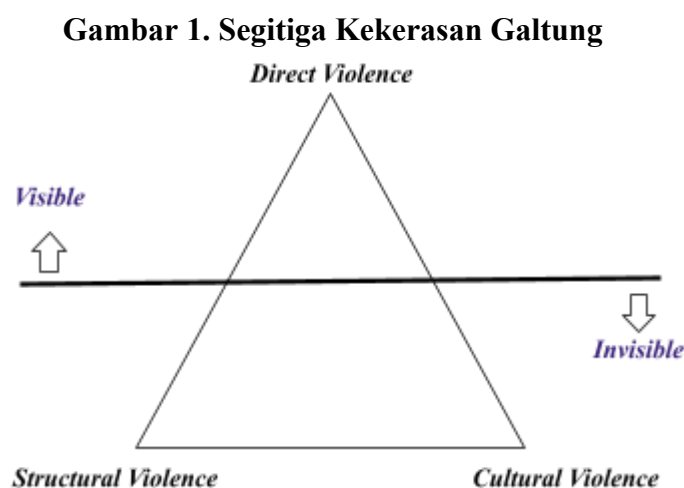
Terkait faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, Radwa Elsaman melalui penelitiannya yang berjudul *Women's Rights In Egyptian Law: The Legal Battle For A Safer Life*, memaparkan bahwasanya diskriminasi yang dilakukan melalui ketidakadilan hukum terhadap perempuan Mesir disebabkan oleh miskonsepsi pemahaman hukum syariah yang menjadi dasar Konstitusi Mesir. Penelitian ini memaparkan bahwasannya hukum syariah hanyalah legitimasi dari pembuat kebijakan terhadap tindakan diskriminatif bagi perempuan Mesir. Penelitian ini juga memaparkan salah satu bukti nyata diskriminasi hukum terhadap perempuan yang tertuang dalam *Egyptian Penal Code* yang mengatur terkait hukuman perzinahan. Dalam *Egyptian Penal Code* hukuman dari perzinahan mencapai dua tahun bagi perempuan sedangkan hanya enam bulan penjara bagi laki-laki. Standar pembuktian juga berbeda dalam hal ini, seorang laki-laki dapat dikatakan melakukan zinah apabila perzinahan terjadi di rumah perkawinan, sementara bagi wanita dapat dihukum di mana pun perzinahan dinilai terjadi (Elsaman 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas mengenai dinamika kekerasan terhadap perempuan Mesir yang terjadi dari masa ke masa mulai dari pemaparan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi hingga pemaparan faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi melalui ketidakadilan hukum Mesir terhadap perempuan Mesir. Namun, penelitian-penelitian terdahulu belum berhasil menjelaskan secara signifikan mengenai dinamika kekerasan terhadap perempuan Mesir melalui pandangan kekerasan yang dipaparkan Johan Galtung dalam teori

segitiga kekerasan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu tersebut tidak menekankan pada waktu yang spesifik ketika membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan Mesir. Oleh karena itu penelitian ini akan memaparkan mengenai dinamika kekerasan terhadap perempuan Mesir, mulai dari bentuk-bentuk kekerasannya, penyebab terjadinya kekerasan, hingga dampak dari kekerasan yang terjadi. Rentang waktu penelitian dari penelitian ini juga akan spesifik yaitu masa Pemerintahan Presiden El-Sisi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi, penelitian ini akan menggunakan kerangka pemikiran segitiga kekerasan yang dipaparkan oleh Johan Galtung. Dalam memaparkan kekerasan, Galtung membagi kekerasan menjadi 3 jenis kekerasan yaitu, kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Ketiga jenis kekerasan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *Triangle Violence* atau segitiga kekerasan yang jika dipandang dari sudut yang berbeda dapat terlihat enam posisi (tiga mengarah ke bawah, tiga mengarah ke atas) memberikan sudut pandang yang berbeda (Galtung 1990, 294).



Sumber : (Galtung 1990 dalam Ercoşkun 2021, 2)

Meskipun terdapat kesinambungan di antara ketiga jenis kekerasan tetap terdapat perbedaan mendasar dalam relasi waktu dari kekerasan yang terjadi. Galtung membagi relasi waktu terjadinya kekerasan ke dalam 3 waktu, kekerasan kultural sebagai kekerasan yang sudah sejak lama terjadi dan bersifat menetap juga sulit diubah, kekerasan struktural sebagai proses dari kekerasan yang berlangsung secara terus-menerus, kadang menguat, kadang melemah, dan kekerasan langsung sebagai peristiwa yang nyata dan terjadi hanya saat kekerasan terjadi (Galtung 1990, 294).

Kekerasan kultural digambarkan oleh Galtung sebagai pemberi legitimasi bagi fakta dari kekerasan struktural dan peristiwa dari kekerasan langsung sehingga masyarakat tidak dapat melihat tindak atau fakta dari kekerasan dan menerima terjadinya kekerasan sebagai hal yang biasa. Kekerasan kultural sendiri dimaksudkan sebagai aspek dari budaya (yang menyimbolkan keberadaan kita) berbentuk agama, ideologi, seni dan bahasa, empirical science dan formal science, serta kosmologi (Galtung 1990, 291-292).

Agar analisis terkait kekerasan kultural dapat berfokus pada legitimasi yang diberikan kekerasan kultural terhadap kekerasan struktural dan kekerasan langsung, penelitian ini menggunakan 3 aspek budaya dari ketujuh aspek yang ada. Ketiga aspek yang digunakan antara lain, aspek agama, ideologi, dan juga bahasa. Menurut Galtung aspek agama dalam kekerasan kultural didasari oleh adanya miskonsepsi ajaran agama yang menekankan pada dikotomi *God Chooses* (kebaikan) dan *the unchosen* (kejahatan). Dalam mendefinisikan aspek ideologi,

Galtung menggunakan dikotomi *self* atau kelompok diri sendiri dan *Other* atau kelompok yang lain. Sementara itu, aspek bahasa didefinisikan oleh Galtung melalui dikotomi *essence* dan *apparition*, di mana dalam bahasa *essence* dianggap sebagai sesuatu yang nyata (berharga), sedangkan *apparition* sebagai suatu penampakan yang dapat diabaikan (tidak bernilai) (Galtung 1990, 296-299).

Tabel 1. Tipologi Kekerasan

	<i>Survival Needs</i>	<i>Well-being Needs</i>	<i>Identity Needs</i>	<i>Freedom Needs</i>
<i>Direct Violence</i>	<i>Killing</i>	<i>Maiming Siege, Sanctions Misery</i>	<i>Desocialization Resocialization Secondary Citizen</i>	<i>Repression Detention Expulsion</i>
<i>Structural Violence</i>	<i>Exploitation A</i>	<i>Exploitation B</i>	<i>Penetration Segmentation</i>	<i>Marginalization Fragmentation</i>

Sumber : (Galtung 1990, 292)

Kekerasan langsung didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi ketika perbedaan antara kemungkinan yang terjadi dan realitas yang sebenarnya tidak lagi dipandang sehingga pembunuhan ataupun upaya melukai orang lain dikategorikan sebagai bentuk dari kekerasan langsung. Kekerasan struktural sendiri didefinisikan sebagai sebuah ketidakadilan sosial yang terkonstruksi di masyarakat (Galtung 1969, 169).

Dalam memahami konsepsi dari kekerasan langsung dan kekerasan struktural, Galtung membedakan kekerasan langsung dan kekerasan struktural ke dalam tipologi empat kelas kebutuhan dasar. Empat kelas kebutuhan dasar tersebut merupakan *Survival Needs* atau kebutuhan hidup manusia yang ketiadaannya dapat mengancam nyawa, *Well-being Needs* atau kebutuhan hidup yang ketiadaannya dapat menyakitkan atau bahkan mengakibatkan kesengsaraan,

Identity Needs atau kebutuhan hidup yang ketiadaannya dapat membuat seseorang terasingkan, dan *Freedom Needs* atau kebutuhan hidup yang ketiadaannya dapat mengekang hingga menindas seseorang (Galtung 1990, 292). Agar analisis dari penelitian ini berfokus pada kebutuhan dasar yang paling tampak dominan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir, pelanggaran terhadap *survival needs*, *well-being needs*, juga *freedom needs* menjadi 3 kategori kebutuhan dasar yang digunakan sebagai indikator dalam analisis dari penelitian ini.

Terjadinya kekerasan langsung yang menyebabkan empat kelas kebutuhan dasar terancam kemudian membagi kekerasan langsung ke dalam beberapa kategori. *Killing* atau kekerasan langsung yang membahayakan *survival needs*, *maiming* atau kekerasan langsung yang membahayakan *well-being needs*, *desocialization*; *resocialization*; dan *secondary citizen* sebagai kekerasan langsung yang membahayakan *identity needs*, serta *repression*; *detention*; dan *expulsion* sebagai kategori kekerasan langsung yang membahayakan *freedom needs* (Galtung 1990, 293).

Peristiwa terjadinya kekerasan struktural juga dapat membahayakan empat kelas kebutuhan dasar sehingga kemudian juga membagi kekerasan struktural ke dalam empat kategori. *Exploitation A* atau kekerasan struktural yang dapat membahayakan *survival needs*, *Exploitation B* atau kategori dari kekerasan struktural yang membahayakan *well-being needs*, *penetration* dan *segmentation* sebagai kekerasan struktural yang membahayakan *identity needs*, serta *marginalization* dan *fragmentation* atau kekerasan struktural yang membahayakan *freedom needs* (Galtung 1990, 293-294).

Meskipun pada Pasal 237 KUHP Mesir seorang suami yang melakukan pembunuhan demi kehormatan terhadap istrinya dapat dikurangi hukumannya menjadi 3 tahun penjara (UNFPA dkk. 2018, 17), analisis kekerasan struktural dalam penelitian ini tidak menggunakan pelanggaran terhadap *survival needs*. Peniadaan pelanggaran terhadap *survival needs* sebagai indikator disebabkan pada masa Presiden El-sisi tidak ditemukan pelaku dari pembunuhan demi kehormatan yang mendapat pengurangan hukuman dari pasal 297 KUHP Mesir. Oleh karena itu, dalam analisis dari penelitian ini hanya ketiga kategori yang digunakan yaitu, pelanggaran terhadap *well-being needs*, *identity needs*, serta *freedom needs*.

1.7 Argumen Sementara

Kekerasan terhadap perempuan Mesir merupakan bentuk diskriminasi dan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan menggunakan kerangka pemikiran tiga konsep kekerasan yang dikemukakan Galtung, sementara penulis menyimpulkan para perempuan Mesir di bawah kepemimpinan Presiden El-Sisi menjadi korban dari kekerasan kultural berbentuk miskonsepsi hukum syariah Islam mengenai strata antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Mesir yang dijadikan agenda tersembunyi dalam menegakkan ideologi otoritarianisme. Adanya miskonsepsi dari hukum syariah Islam tersebut kemudian menjadi akar dari kekerasan struktural dan juga kekerasan langsung yang dialami oleh perempuan Mesir. Penangkapan dan penahanan seorang aktivis, Amal Fathy pada 2018 lalu atas tuduhan penyebaran berita bohong dan *insulting public decency*, merupakan contoh dari kekerasan struktural dan kekerasan langsung yang berakar dari kekerasan kultural.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui penelitian kualitatif penelitian ini akan melalui proses penelitian deskripsi-analisis yang menyajikan fakta dari suatu peristiwa. Dengan menggunakan sumber data sekunder atau studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan jurnal ilmiah mengenai konsep kekerasan oleh Johan Galtung, jurnal ilmiah dari penelitian terdahulu mengenai kekerasan yang dialami perempuan Mesir, beserta situs web dari berbagai NGO seperti *Human Right Watch* sebagai sumber data sehingga data yang diperoleh dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Presiden Abdul Fattah El-Sisi merupakan subjek dari penelitian ini. Sementara itu, perempuan Mesir merupakan objek dari penelitian ini. Penelitian ini akan dianalisis melalui teori segitiga kekerasan yang dipaparkan oleh Johan Galtung.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka berupa jurnal ilmiah, artikel daring, dan juga berbagai situs web resmi milik NGO seperti *Amnesty International* dan juga berbagai situs web resmi milik United Nation sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan penulis diawali dengan melakukan identifikasi data dari berbagai sumber data seperti jurnal ilmiah, artikel daring, dan juga berbagai situs web resmi yang relevan dengan tema penelitian ini yaitu Kekerasan Struktural terhadap Perempuan Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi. Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data dari sumber data yang sebelumnya telah diidentifikasi. Setelah melakukan pengumpulan data, penulis kemudian melakukan analisis melalui teori yang penulis gunakan sehingga dapat memberikan pemahaman dari hasil penelitian yang dilakukan. Yang terakhir penulis melakukan penyusunan hasil penelitian yang ditulis ke dalam skripsi.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika pembahasan pada penelitian ini akan dilakukan dengan membagi ke dalam empat bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan penulis nantinya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

Bab II : Analisis Kekerasan Kultural terhadap Perempuan Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi

Bab kedua dari penelitian ini akan ditulis dengan memaparkan kondisi kekerasan kultural yang dihadapi para perempuan Mesir pada masa Pemerintahan

Presiden Abdul Fattah El-Sisi, melalui penjelasan aspek agama, aspek ideologi, dan aspek bahasa dari kekerasan kultural.

Bab III : Analisis Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung terhadap Perempuan Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi

Pada bab ketiga penelitian ini akan memaparkan mengenai pemaparan kondisi kekerasan struktural dan langsung melalui tipologi kekerasan yang terdapat pada teori tiga konsep kekerasan.

Bab IV : Penutup

Bab yang menjadi penutup dari penelitian ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan sehingga juga terdapat jawaban dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB 2
ANALISIS KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN
MESIR

Pada bab 2 dari penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai bagaimana kekerasan kultural menjadi akar dari kekerasan yang terjadi terhadap para perempuan Mesir. Analisis terkait kekerasan kultural pada studi kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-sisi akan dilakukan melalui aspek-aspek yang terdapat pada kekerasan kultural yang dikemukakan oleh Johan Galtung. Dalam analisis ini aspek agama, ideologi, dan bahasa menjadi aspek pendorong dari terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung yang digunakan dalam penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi.

2.1. Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Mesir Berdasarkan Aspek Agama

Galtung mengemukakan bahwasannya aspek agama dalam kekerasan kultural didasari oleh adanya miskonsepsi dari agama yang menekankan pada dualisme kebaikan dan kejahatan. Dalam hal ini dipercayai bahwasannya dikotomi antara kebaikan sebagai sifat dari Tuhan dan kejahatan sebagai sifat dari setan harus ada agar tercipta keseimbangan di alam semesta. Dari kehadiran dikotomi tersebut kemudian memunculkan konsekuensi negatif berupa fanatisme terhadap agama yang kemudian mendorong terjadinya kekerasan kultural (Galtung 1990, 296).

Fanatisme terhadap agama memunculkan miskonsepsi dari dobel dikotomi mengenai kehidupan akhirat yang menjadi kelanjutan dari dikotomi yang ada sebelumnya. Dobel dikotomi mengenai kehidupan akhirat mengelompokkan antara Tuhan (dengan kebaikan sebagai sifatnya) bersama manusia yang dipilih-Nya dengan manusia yang tidak terpilih bersama setan dan tujuan akhir atau kehidupan akhirat dari dikotomi tersebut. Manusia yang dipilih Tuhan dipercaya akan mendapat keselamatan di surga bersama Tuhan, sementara itu kelompok manusia yang tidak terpilih akan terkutuk di neraka bersama setan. Pengelompokan dari dobel dikotomi tersebut kemudian memunculkan interpretasi bahwasannya mereka yang dipilih Tuhan memiliki strata yang lebih tinggi dari kelompok lainnya (Galtung 1990, 297).

Tabel 1. Dikotomi Yang Terpilih dan Tidak terpilih

<i>God Chooses</i>	<i>And Leaves to Satan</i>	<i>With the Consequence of</i>
<i>Human Species</i>	<i>Animals, Plants, Nature</i>	<i>Speciesism, Ecocide</i>
<i>Men</i>	<i>Women</i>	<i>Sexism, Witch-burning</i>
<i>His People</i>	<i>The others</i>	<i>Nationalism, Imperialism</i>
<i>Whites</i>	<i>Colored</i>	<i>Racism, Colonialism</i>
<i>Upper Classes</i>	<i>Lower Classes</i>	<i>'Classism', Exploitation</i>
<i>True Believers</i>	<i>Heretics, Pagans</i>	<i>'Meritism', Inquisition</i>

(Sumber: Galtung 1990, 297)

Interpretasi mengenai strata yang diciptakan oleh 'God Chooses' atau yang dipilih Tuhan, menganggap 'The Unchosen' atau yang tidak terpilih sebagai kelompok yang harus bergantung kepada mereka di dunia ini agar kelak mendapat

keselamatan di akhirat. Sebagaimana terurai dalam Tabel 1, Galtung memaparkan bahwasannya dikotomi mengenai laki-laki sebagai yang dipilih tuhan dan perempuan sebagai kelompok atau golongan yang tidak dipilih telah muncul sejak awal peradaban manusia. Dengan kata lain, sejak awal peradaban manusia fanatisme terhadap agama ataupun kepercayaan sudah membentuk strata antara laki-laki dan perempuan, dan menempatkan perempuan pada kelas yang lebih rendah dari laki-laki. Dikotomi yang menciptakan strata antara laki-laki dan perempuan kemudian membawa konsekuensi berupa hadirnya seksisme dalam lingkungan masyarakat (Galtung 1990, 297).

Sebagaimana pemaparan Galtung yang tertera pada Tabel 1 mengenai dikotomi yang terpilih dan tidak terpilih, hadirnya strata antara laki-laki dan perempuan dalam nilai moral Mesir yang didasari oleh miskonsepsi hukum syariah Islam menjadi kekerasan kultural aspek agama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa pemerintahan Presiden El-Sisi. Kehadiran strata antara laki-laki dan perempuan pada konstruksi sosial di Mesir kemudian menjadi akar dari terjadinya berbagai peristiwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Mesir. Padahal hukum syariah Islam yang berdasar pada Al-Quran dan Hadist tidak pernah memberikan strata atau membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan (Fidhayanti dkk. 2024, 45).

Quran Surat An-Nisa ayat 11 merupakan salah satu miskonsepsi hukum syariah Islam yang sering menjadi justifikasi golongan patriarki Mesir dalam menciptakan strata sosial antara laki-laki dan perempuan mengenai hukum syariah pembagian harta waris bagi perempuan dan laki-laki di Mesir. Dalam pengimplementasiannya, hukum syariah mengenai pembagian harta waris di

Mesir tidak benar-benar dilaksanakan sebagaimana ditentukan. Hak perempuan Mesir terhadap setengah bagian yang seharusnya diberikan seringkali diabaikan. Al-shronbasy menjelaskan adanya perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan karena laki-laki dari keluarga yang ditinggalkan dianggap menjadi seseorang yang akan bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan bahkan membiayai pernikahan saudara perempuannya yang mana biasanya di Mesir membutuhkan biaya yang tidak sedikit (M. Arafa and El-Ashry 2017, 60-61).

Selain itu, miskonsepsi hukum syariah pembagian harta waris juga kemudian menjadi penyebab dari ketimpangan gender yang terjadi di Mesir. Perempuan yang mendapat separuh bagian dari laki-laki kemudian dalam masyarakat Mesir dianggap hanya bernilai setengah dari laki-laki bahkan pada persoalan lainnya yang berada di luar pembagian harta waris. Miskonsepsi hukum syariah yang terjadi menyebabkan hak-hak perempuan yang sudah terjamin dalam Islam tidak dijalankan sebagaimana mestinya, bahkan perempuan yang menuntut haknya sering dianggap sebagai penentang agama (M. Arafa and El-Ashry 2017, 61).

Nyatanya miskonsepsi dari penerapan hukum syariah terkait hukum waris pada masa pemerintahan Presiden El-Sisi tidak berjalan sesuai dengan hukum syariah Islam yang sesungguhnya. Hukum syariat Islam tidak pernah membedakan nilai laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat terlihat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyebutkan, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, tafsir dari Ibnu Katsir terhadap ayat tersebut menyatakan yang dapat membedakan derajat

maupun strata manusia di sisi Allah hanyalah ketakwaannya (Ibn Kathir 2004, 495–96). Dalam perspektif agama Islam sendiri lebih mengutamakan hak laki-laki sementara mengabaikan hak perempuan merupakan penghambat utama dalam mewujudkan terjadinya keadilan gender (M. Arafa and El-Ashry 2017, 61).

Praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) menjadi miskonsepsi terhadap hukum syariah Islam lainnya yang dapat terlihat melalui kehadiran strata dari dikotomi *God chooses* dan *the unchosen*. Praktik FGM sudah menjadi budaya yang mengakar kuat sebab dianggap sebagai praktik yang dapat menjaga kesucian dari perempuan dan kesucian yang terjaga dari perempuan dianggap dapat menjaga kehormatan keluarga. Data statistik UNICEF pada tahun 2021 mengenai praktik FGM di Mesir menunjukkan bahwasannya terdapat 86% perempuan Mesir usia 15 hingga 49 telah mengalami FGM (UNICEF 2021).

Praktik FGM yang masih marak terjadi di Mesir menjadi miskonsepsi hukum syariah Islam lainnya. Orang tua yang melakukan FGM terhadap anak perempuannya mengakui bahwasannya FGM dilakukan untuk menjaga kesucian anak perempuannya dengan alasan agama. Nyatanya tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun Hadist yang menyatakan praktik FGM sebagai tolak ukur dari kesucian dan kehormatan perempuan. FGM yang juga menjadi isu terhadap perempuan di negara Afrika lainnya, merupakan tradisi budaya patriarki di Afrika yang sudah dipraktikkan sejak zaman Afrika kuno (Eltahawy 2016, 110).

Pada masa Pemerintahan El-sisi miskonsepsi terhadap hukum syariah Islam menjadi aspek agama dari kekerasan kultural yang menyebabkan kekerasan struktural dan juga kekerasan langsung di Mesir menjadi berkelanjutan hingga saat ini. Hadirnya strata antara laki-laki dan perempuan sebagai miskonsepsi

hukum syariah islam tidak terlepas dari adanya kontrol pemerintah yang berlebihan terhadap lembaga keagamaan Mesir. Sejak tahun pertama pemerintahan Presiden El-sisi dimulai, penggunaan lembaga-lembaga agama di Mesir sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. El-Sisi menjadikan pengendalian secara berlebihan terhadap lembaga agama di Mesir sebagai salah satu strategi politiknya dalam menghadapi kelompok Islamis dan memperkuat gambaran dirinya di tingkat internasional sebagai seorang “reformis agama,” terutama di kalangan Barat (Al-Anani 2022).

Oleh karena itu sejalan dengan pemaparan Galtung, miskonsepsi hukum syariah islam dalam pembagian harta waris dan praktik FGM di Mesir dapat dikatakan sebagai bentuk dari kekerasan kultural beraspek agama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. Hadirnya strata yang menempatkan laki-laki sebagai *God chooses* dan perempuan sebagai *the unchosen* melalui miskonsepsi hukum syariah islam yang menjadi justifikasi dalam kasus ini menjadi bukti dari kekerasan kultural dengan aspek agama.

2.2 Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Mesir Berdasarkan Aspek Ideologi

Menurut Galtung, aspek ideologi pada kekerasan kultural didasari oleh modernisasi pada negara yang membawa sekularisme membuat manusia menggantikan konsep agama dengan ideologi politik. Meskipun konsep Tuhan dan setan Tuhan tidak lagi digunakan, dikotomi antara yang terpilih dan tidak terpilih tetap dipertahankan. Galtung kemudian menyebut dikotomi antara yang

terpilih dan tidak terpilih dalam aspek ideologi sebagai *Self* atau kelompok diri sendiri dan *Other* atau kelompok yang lain (Galtung 1990, 298).

Ketika Tuhan tidak lagi digunakan sebagai legitimasi sosial, dikotomi antara yang terpilih dan yang tidak terpilih akan tetap bertahan selama struktur dikotomis yang mengakar pada kebudayaan tetap hidup. Pada kondisi ini keyakinan akan adanya dikotomi antara *Self* dan *Other* akan bertahan dalam bentuk *speciesism* atau anggapan manusia lebih unggul dari makhluk hidup lain, *classism* atau anggapan adanya kelas sosial yang lebih unggul, dan *meritism* atau anggapan mengenai yang berprestasi yang berhak mendapat keuntungan. Pada aspek ideologi dari kekerasan struktural, nasionalisme yang berakar pada dikotomi adanya orang-orang terpilih dan memiliki justifikasi dari agama maupun ideologi kemudian perlu dilihat bersama dengan statisme atau anggapan yang percaya negara memiliki otoritas dalam mengatur masyarakat. Galtung kemudian menjelaskan gabungan dari nasionalisme dengan dikotomi *Self* dan *Other* ditambah statisme yang memberikan negara hak bahkan kewajiban untuk menggunakan kekuasaan tertinggi akan membentuk ideologi yang merusak (Galtung 1990, 298-299).

Kekerasan struktural dan kekerasan langsung dapat terjadi melalui jurang pemisah yang sangat tajam dari dikotomi *Self* dan *Other*. Dikotomi *Self* dan *Other* membentuk jurang pemisah yang tajam dengan membanggakan bahkan memuja nilai-nilai yang dimiliki *Self*, sementara pada waktu yang sama menghina bahkan melecehkan nilai-nilai yang dimiliki *other*. Ketika kelompok *other* semakin dianggap hina dan dieksploitasi, maka terjadi kekerasan struktural. Kemudian ketika kelompok *other* tidak hanya direndahkan martabatnya sebagai manusia,

tetapi juga berhasil diubah menjadi sebuah ‘benda’, maka semua bentuk dari kekerasan langsung dapat terjadi (Galtung 1990, 298).

Otoritarianisme menjadi ideologi yang dominan pada pemerintahan Presiden Abdel Fattah El-Sisi. Sebelum pencalonannya sebagai Presiden Mesir, El-Sisi merupakan seorang perwira militer yang tidak memiliki latar belakang politik. Latar belakang militer yang sangat kuat kemudian mempengaruhi sistem pemerintahan yang mengalami militerisasi, dengan pola pengorganisasian top-down. El-Sisi cenderung menyukai metode kontrol yang berbasis pada penanaman rasa takut dan manipulasi (Larres 2021, 296–97). Pengontrolan yang berlebihan nyatanya sering dilakukan untuk memperkuat kestabilan rezim yang otoriter di Mesir (Reich 2023, 12).

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi, keluarga menjadi lembaga mikro politik alternatif yang paling berpengaruh dalam membuktikan berjalannya ideologi otoritarianisme. Hal ini disebabkan pada Rezim El-sisi, keluarga menjadi pelaku atau agen dari rezim otoriter di Mesir. Otoritarianisme pada Rezim El-sisi menggunakan konsep nilai kekeluargaan Mesir sebagai norma sosial yang digunakan untuk memastikan terjaganya kepatuhan dari para perempuan Mesir. Fenomena ini tercermin dari penggunaan nilai kekeluargaan dalam membangun identitas nasional dan mempertahankan citra bangsa dengan menjadikan perempuan sebagai representasi kehormatan bangsa yang perlu dijaga dan diawasi demi menjaga martabat bangsa (Nagel 1998, 256).

Konsep nilai kekeluargaan yang dijadikan sebagai representasi kehormatan bangsa pada masa pemerintahan Presiden El-Sisi dapat dilihat pada pidato

Presiden El-sisi dalam acara *Ceremony of Honoring Egyptian Women and the Ideal Mothers* pada Maret 2019 lalu. Dalam pidatonya El-sisi menekankan akan pentingnya pemenuhan hak perempuan Mesir dalam berbagai aspek kehidupan. Penekanan yang dilakukan El-sisi dalam pidatonya menunjukkan agenda progresif terkait kesetaraan gender di Mesir, akan tetapi disisi lain melalui pidatonya El-sisi hanya menyanjung peran perempuan dalam masyarakat Mesir secara lingkup domestik. Sanjungan terhadap perempuan secara domestik tersebut menggambarkan perempuan sebagai ibu dan istri yang memiliki peran sebagai pengasuh dari anak-anaknya dan pendukung dari laki-laki di keluarga yang telah bekerja keras untuk bangsa Mesir. Selain itu dalam pidatonya tersebut El-sisi juga menyampaikan mengenai peran perempuan dalam hal kemajuan bangsa, dimana kemajuan bangsa dianggap bergantung kepada moralitas keluarga yang juga bergantung pada moralitas para perempuan Mesir (The Arab Republic of Egypt Presidency 2019).

Melalui ideologi otoritarianisme, kesucian dan kehormatan perempuan Mesir pada masa pemerintahan El-sisi berperan sebagai penjaga kesucian dan moralitas bangsa sehingga menjaga moralitas perempuan dianggap penting untuk mempertahankan citra dan integritas bangsa secara kolektif. Perempuan menjadi pihak yang dibebani oleh norma yang terbentuk oleh nilai moral yang mengekang seksualitas perempuan. Wilhelm Reich berpendapat bahwasannya pengekangan terhadap seksualitas perempuan merupakan *key factor* dalam rezim yang otoriter sebab pengekangan terhadap perempuan akan menghasilkan individu yang patuh dan masyarakat yang terkontrol oleh tatanan dari rezim yang berkuasa (Reich 2023, 22).

Kehadiran urgensi dari mempertahankan karakter Mesir sebagai negara yang terhormat dan bermoral membuat norma sosial yang terbentuk dari moralitas yang terkandung dalam nilai kekeluargaan Mesir menimbulkan obsesi tersendiri dari masyarakat Mesir terhadap kesucian perempuan Mesir. Agar kehormatan bangsa dapat terus terjaga penjagaan dan pengawasan terhadap tubuh dan kehidupan perempuan Mesir kemudian dianggap sebagai tanggung jawab kolektif dari masyarakat Mesir (Nagel 1998, 256).

Kesucian perempuan yang dianggap sebagai tanggung jawab kolektif dari masyarakat karena dapat berdampak pada kehormatan nasional, membuat pengendalian terhadap kesucian perempuan tidak hanya dilakukan oleh keluarga. *Security* gedung yang juga dikenal dengan sebutan *bawab* merupakan salah satu figur di luar keluarga yang berperan besar dalam menjaga kesucian perempuan di masyarakat. Meskipun pekerjaan mereka secara resmi hanya mencakup tugas-tugas kebersihan dan pengelolaan teknis sehari-hari, *bawab* memiliki peran sosial yang lebih luas dan berpengaruh, khususnya dalam hal mengawasi moral dan perilaku penghuni gedung, terutama perempuan (Eid 2018).

Meskipun dalam sistem hukum Mesir keputusan mengenai kasus pelanggaran moral membutuhkan keputusan akhir dari Pengadilan Mesir, pada praktiknya masih terdapat *bawab* yang melakukan penghakiman dengan caranya sendiri (Eid 2018). Penghakiman yang dilakukan para *bawab* biasanya berupa penanaman dan penyebaran stigma terhadap para perempuan yang dianggap telah melanggar norma kehormatan keluarga dengan tidak menjaga kesuciannya, tetapi tidak jarang juga penghakiman yang terjadi terhadap perempuan Mesir dilakukan melalui kekerasan fisik. Salah satu penghakiman yang dilakukan oleh *bawab*

terjadi pada 2021 lalu dimana seorang perempuan Mesir mengalami kekerasan fisik hingga meregang nyawa (Pleasance 2021).

Anggapan mengenai kesucian dan kehormatan perempuan sebagai perwujudan martabat bangsa yang terkandung dalam nilai kekeluargaan Mesir mencerminkan pendapat Galtung mengenai kekerasan kultural dengan aspek ideologi. Kehadiran dari dikotomi *self and other* yang menempatkan laki-laki Mesir sebagai *self* atau golongan superior dan perempuan sebagai *other* atau golongan inferior. Dalam kasus penghakiman oleh *bawab*, penghakiman dianggap sebagai bentuk nasionalisme dari para *bawab* karena melindungi martabat bangsa melalui melindungi kehormatan perempuan di masyarakat. Sementara itu, bentuk nasionalisme dari para perempuan Mesir dibebankan dengan norma moralitas yang harus dijalankan dan akan dikaitkan dengan rasa malu apabila dinilai gagal dalam menjalankan norma. Menurut Galtung, Nasionalisme yang didasari oleh gagasan mengenai superioritas suatu golongan dan mendapat justifikasi dari agama dan ideologi, secara bersamaan harus dipandang dengan statisme atau anggapan yang memandang negara memiliki hak mutlak dalam mengatur kehidupan rakyatnya hingga menentukan nilai yang salah dan nilai yang benar (Galtung 1990, 298).

Dikotomi *self* dan *other* yang menjadi akar dari terjadinya kasus kekerasan langsung terdapat dalam kasus penghakiman secara fisik oleh para *bawab*. Ketika para perempuan Mesir yang dianggap sebagai *other* dinilai telah ternoda kesuciannya dan tidak dapat menjaga kehormatan keluarganya, objektifikasi terhadap para perempuan Mesir tidak dapat terhindar hingga menyebabkan terjadinya kekerasan secara fisik yang dapat membahayakan nyawa. Bentuk nyata

dari dikotomi *self* dan *other* kemudian dapat terlihat secara langsung pada kasus penghakiman seorang perempuan Mesir pada tahun 2021. Karena menerima teman laki-laknya di ruang tamu rumahnya, seorang perempuan Mesir harus kehilangan nyawanya melalui pembunuhan demi kehormatan yang dilakukan seorang *bawab* dan pemilik apartemennya (Pleasance 2021). Dikotomi *self* dan *other* dapat terlihat jelas dalam kasus tersebut dimana teman laki-laki yang menjadi penyebab korban dianggap telah mencoreng martabat lingkungan tempat tinggalnya tidak mendapat penghakiman yang serupa.

Melalui pengontrolan kesucian perempuan sebagai bagian dari kehormatan keluarga dan negara, ideologi otoritarianisme yang melekat pada Pemerintahan Presiden El-sisi juga membuktikan tidak terjaminnya hak politik bagi perempuan Mesir. Otoritarianisme pada Pemerintahan Presiden El-sisi dapat dilihat melalui penangkapan terhadap sejumlah perempuan Mesir yang mengkritik pemerintah atas buruk penanganan kekerasan seksual di Mesir. Sebagai implementasi dari *freedom of speech* yang menjadi indikator dari pemenuhan hak politik, setiap warga negara pengguna sosial media memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan menyampaikan pandangan alternatif yang berbeda dari pemerintah tanpa takut akan mendapat represi (Ziegenhain and Enkhtaivan 2024, 77).

Penangkapan terhadap laki-laki yang mengkritik pemerintah juga terjadi di Mesir, akan tetapi kriminalisasi moral seperti *insulting public decency* hanya terjadi pada perempuan yang mengkritik pemerintah. penangkapan terhadap laki-laki Mesir biasanya lebih tersentral pada tuduhan politik. Seperti penangkapan dari Alaa Abdel Fattah, seorang aktivis yang ditangkap pada 2021

lalu atas penyebaran berita hoax karena mengkritik buruknya penanganan medis di penjara Mesir (Al Jazeera 2022).

Pada kasus penangkapan perempuan Mesir yang mengkritik pemerintah mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan Mesir, dikotomi *self* dan *other* membentuk peran Pemerintah dan Aparat berwenang Mesir sebagai *self* dan para perempuan Mesir yang ditangkap karena mengkritik pemerintah sebagai *other*. Hadirnya rasa lebih unggul dari Pemerintah dan Aparat berwenang Mesir yang dijustifikasi melalui ideologi otoritarianisme, kekerasan kultural kemudian terjadi pada para perempuan Mesir yang ditangkap karena mengkritik pemerintah yang dianggap sebagai *other*. Dengan kata lain, ketidakmampuan Pemerintah Mesir dalam memenuhi hak politik dari para perempuan Mesir khususnya para aktivis perempuan yang menjadi bentuk lain dari berjalannya ideologi otoritarianisme, menggambarkan terjadinya kekerasan kultural.

2.3 Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Mesir Berdasarkan Aspek Bahasa

Galtung berpendapat aspek bahasa dalam kekerasan kultural merupakan bagian yang lebih mengakar dari kebudayaan. Kedalaman budaya yang berbeda dari aspek kebudayaan lainnya membuat kekerasan struktural dan kekerasan langsung memiliki hubungan yang lebih samar dengan aspek bahasa dibandingkan aspek-aspek kekerasan kultural lainnya. Dalam aspek bahasa, kekerasan yang terjadi dapat terlihat secara tersirat. Pada aspek bahasa, Galtung memberikan dikotomi antara *essence* dan *apparition*, di mana *essence* dianggap sebagai sesuatu yang nyata (berharga) dan *apparition* sebagai suatu penampakan

yang dapat diabaikan (tidak bernilai). Dalam dikotomi aspek bahasa *essence* dianggap memiliki justifikasi secara budaya untuk dapat merendahkan *apparition* yang dianggap tidak bernilai (Galtung 1990, 299).

Seksisme bahasa dalam bahasa arab yang digunakan di Mesir merupakan kekerasan kultural beraspek bahasa pada kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. Penggunaan bahasa secara sosial memiliki peran yang sangat penting dalam proses menjalin relasi gender antara laki-laki dan perempuan, karena dalam penggunaan bahasa bias gender sering tak bisa terhindarkan (Rofiah 2023, 10).

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi, konstruksi sosial Mesir memberikan perempuan Mesir peran sebagai ibu bangsa memberikan perbandingan dalam tata kebahasaan Mesir. Peran sebagai ibu bangsa membebankan perempuan Mesir pada kewajiban sebagai perwujudan kehormatan bangsa, sementara laki-laki Mesir mendapat peran sebagai pelindung dari kehormatan bangsa dalam konstruksi sosial Mesir. Kesucian dari perempuan dianggap sebagai perwujudan kehormatan bangsa yang menentukan kemuliaan dan martabat masyarakat Mesir sehingga kemudian menimbulkan obsesi modern terhadap keperawanan perempuan (Nagel 1998, 256).

Obsesi terhadap keperawanan perempuan kemudian secara tidak langsung mengekang perempuan dalam batasan moralitas yang subjektif. Para perempuan Mesir diharapkan untuk selalu menjalankan nilai-nilai moral seperti kesederhanaan, kesalehan, kepatuhan, dan memiliki rasa malu. Jika nilai-nilai moral tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, maka perempuan akan dianggap

sebagai pembawa kehormatan keluarga bahkan kehormatan nasional. Sementara itu jika nilai-nilai moral tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka stigma yang mempertanyakan martabat dan rasa malu akan mengikuti perempuan yang tidak menjalankannya (Martinelli 2022, 3).

Para perempuan Mesir yang berhasil menjalankan nilai-nilai moral dan menjaga kesuciannya (keperawanannya) akan dikaitkan dengan kata *sharaf* atau kehormatan nasional. salah satu contoh penggunaan kata *sharaf* yang melekat pada perempuan di Mesir merupakan penggunaan kata *sharaf* pada frasa *laf al-sharaf* atau kain kehormatan yang digunakan pada ritual *dukhla baladi*. *Dukhla baladi* sendiri merupakan ritual pengecekan keperawanan pada pengantin baru di Mesir yang dilakukan seorang bidan terhadap pengantin perempuan di hadapan pengantin laki-laki dan ibu dari kedua mempelai. Pada ritual ini bidan menggunakan *laf al-sharaf* sebagai pelapis dari jari atau pisau kecil untuk membuktikan kesucian dari pengantin perempuan. Apabila *laf al-sharaf* yang digunakan menunjukkan adanya noda darah, maka secara tradisional kain tersebut akan dipertontonkan kepada anggota keluarga besar dan para kerabat sebagai bentuk pembuktian bahwa keluarga pengantin perempuan telah berhasil menjaga martabatnya (Wynn dan Hassanein 2017, 114).

Di Mesir kata *sharaf* yang melekat pada perempuan juga terjalin pada kata *karāma* atau martabat yang melekat pada laki-laki. Martabat dari laki-laki dianggap sangat terkait dengan reputasi keluarganya. Keterkaitan antara kata *sharaf* yang melekat dengan perempuan Mesir dan *karāma* dari laki-laki kemudian membuat laki-laki Mesir mendapat justifikasi untuk dapat mengendalikan

perempuan dalam berbagai aspek mulai dari cara perempuan berpakaian hingga perizinan dalam bersosialisasi di masyarakat (Scroope 2017).

Kehormatan keluarga dalam konstruksi sosial Mesir dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab laki-laki untuk melindunginya, tetapi ketika kehormatan keluarga ternodai yang akan disalahkan adalah perempuan. Dalam situasi ini perempuan yang mengalami kekerasan justru menjadi pihak yang layak untuk disalahkan dan harus menanggung rasa malu. Kehormatan dari perempuan yang tampil di ruang publik dianggap berada dalam situasi yang terancam dan secara seksualitas dianggap terbuka sehingga mereka dianggap pantas menerima kekerasan. Oleh karena itu untuk menghindari rasa malu perempuan justru dinasehati untuk menyembunyikan diri di rumah atau menjauh dari ruang publik (Zakariya 2019a, 115).

Perempuan yang berperilaku berlawanan dengan nilai moral yang berlaku akan dianggap tidak dapat menjaga kesuciannya dan membawa rasa malu. Dalam bahasa arab Mesir rasa malu dari perempuan sering dikaitkan dengan sebutan *'ār*. Kata *ār* sendiri dalam bahasa Arab Mesir memiliki arti aib dan dalam konteks perempuan Mesir kata *'ār* berperan seperti stigma yang terus mengikuti (Martinelli 2022, 3). Penggunaan kata *'ār* dapat terlihat pada peribahasa Mesir *al-bint bitgeeb el-'ār wel-mi'yār wel-'adū li-bāb ed-dār* yang berarti seorang anak perempuan membawa aib, standar buruk, dan musuh ke depan pintu rumah (Darwish 2015). Ketika perempuan diposisikan sebagai subjek rasa malu dan dilekatkan dengan berbagai bentuk stigma sosial, maka tubuh serta identitas mereka mengalami konstruksi ulang secara menyeluruh. Dalam hal ini, rasa malu tidak sekadar menjadi respons emosional terhadap pelanggaran norma dan

ekspektasi sosial, melainkan berubah menjadi atribut yang melekat pada tubuh perempuan dan membentuk citra identitas mereka di mata masyarakat (Martinelli 2022, 3).

Dalam dikotomi *essence* dan *apparition* pada kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi, *essence* tergambar pada perempuan Mesir yang disandingkan dengan kata *sharaf*, kata yang memberikan kehormatan. Sementara itu, *apparition* dapat terlihat melalui penggunaan kata *ār*, yang berikan untuk merendahkan martabat perempuan. Dengan kata lain, perempuan Mesir akan dianggap terhormat apabila berhasil menjaga kesuciannya dan memenuhi nilai moral di masyarakat, tetapi ketika mereka dianggap gagal menjaga kesuciannya dan memenuhi nilai moral di masyarakat maka aib yang mencoreng kehormatan bangsa.

BAB 3

ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN KEKERASAN LANGSUNG TERHADAP PEREMPUAN MESIR

Pada analisis kekerasan kultural yang telah dilakukan di bab II, dapat diketahui bahwasannya ketiga aspek dari kekerasan kultural yaitu aspek agama, ideologi, dan bahasa menjadi akar dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa pemerintahan Presiden El-sisi. Aspek agama, ideologi, dan bahasa dalam kekerasan kultural merupakan akar dari terjadinya kekerasan struktural terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. Sementara pada kekerasan langsung yang terjadi, ketiga aspek yang digunakan pada analisis bab II merupakan akar dari terjadinya kekerasan langsung.

Kekerasan struktural dan kekerasan langsung yang menjadi perpanjangan proses dari kekerasan kultural dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa pemerintahan Presiden El-sisi akan dianalisis pada bab III dari penelitian ini. Tipologi empat kelas kebutuhan dasar yang membedakan kekerasan struktural dan kekerasan langsung akan digunakan dalam menganalisis kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1, keempat kategori kebutuhan dasar manusia tersebut mencakup *Survival Needs* atau kebutuhan untuk bertahan hidup yang jika tidak terpenuhi dapat membahayakan nyawa; *Well-being Needs* atau kebutuhan akan kesejahteraan yang ketidakadaannya berpotensi menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis; *Identity Needs* atau kebutuhan akan identitas diri yang bila diabaikan dapat menyebabkan individu mengalami keterasingan sosial; dan *Freedom Needs* atau

kebutuhan akan kebebasan yang jika dirampas dapat mengarah pada pengekangan hingga bentuk penindasan (Galtung 1990, 292).

3.1 Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan Mesir

Seperti yang tertera pada tabel 1, empat tipologi pemenuhan kebutuhan dasar menjadikan kekerasan struktural terbagi ke dalam 4 kategori. Galtung berpendapat bahwasanya kekerasan struktural yang paling mendasar merupakan eksploitasi. eksploitasi sendiri dapat diartikan sebagai kondisi dari sebuah struktur yang menguntungkan kelompok dominan dengan menindas kelompok inferior. Galtung kemudian membagi *exploitation* menjadi *Exploitation A* dan *Exploitation B* (Galtung 1990, 293).

Kondisi di mana tidak terpenuhinya *survival needs* dalam kekerasan struktural disebut dengan *Exploitation A* yang menjadi kategori pertama dari kekerasan struktural. *Exploitation A* dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi struktur sosial yang timpang dengan kelompok dominan yang menindas kelompok inferior hingga dapat membahayakan nyawa dari kelompok inferior. *Exploitation B* yang merupakan kategori kedua dari kekerasan struktural, dapat didefinisikan sebagai kondisi tidak terpenuhinya *Well-being Needs* dari kelompok inferior yang menyebabkan kelompok inferior hidup dalam kondisi tertindas hingga dapat menyakiti atau bahkan mengakibatkan kesengsaraan (Galtung 1990, 293-294).

Galtung kemudian melabeli kategori kekerasan struktural lainnya yang membahayakan *Identity needs* dan *Freedom needs* dari kelompok inferior sebagai komponen penguat dari eksploitasi. Kategori kekerasan struktural yang dapat membahayakan *identity needs* dikenal sebagai *penetration* dan *segmentation*,

sementara Kategori kekerasan struktural yang dapat membahayakan *Freedom needs* dikenal sebagai *marginalization* dan *fragmentation*. Dalam kekerasan struktural empat kategori tersebut menjadi penghalang bagi terbentuknya kesadaran dan juga mobilisasi kelompok tertindas (Galtung 1990, 294).

Penetration dapat didefinisikan sebagai penanaman pengaruh paham kelompok dominan terhadap kelompok inferior. *Segmentation* dapat diartikan sebagai pengelompokan kelompok inferior sehingga informasi yang diterima kelompok inferior menjadi terbatas dan teralihkan dari realitas yang ada. Sementara itu *marginalization* dapat diartikan sebagai pengucilan terhadap kelompok inferior dengan mengesampingkan pemenuhan hak dari kelompok inferior. Dan yang terakhir, *fragmentation* dapat didefinisikan sebagai tindakan pemecah belah kelompok inferior sehingga mobilisasi dapat terhambat (Galtung 1990, 294).

Exploitation B, *Penetration*, *Segmentation*, dan *Marginalization* merupakan kategori kekerasan struktural yang akan dibahas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. *Well-being needs*, *identity needs*, dan *freedom needs* menjadi tiga kelas kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat terpenuhi pada kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi.

3.1.1 Kekerasan Struktural yang Membahayakan *Well-being Needs*

Exploitasi B merupakan kategori kekerasan struktural yang membahayakan *well being needs* yang terjadi pada kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. Miskonsepsi dari

hukum syariah islam memberikan legitimasi pada struktur sosial Mesir hingga terbentuk strata yang timpang dan memposisikan perempuan sebagai golongan inferior. Di Mesir praktik kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh penjuru negeri, perempuan yang ditempatkan sebagai golongan inferior kerap kali mendapat kekerasan yang menyakiti secara fisik maupun psikis sehingga mengakibatkan kesengsaraan. Kekerasan terhadap perempuan Mesir yang terjadi juga seringkali dianggap sebagai hal yang sepele karena menjadi salah satu bentuk demonstrasi kuasa laki-laki terhadap perempuan (Zakariya 2019a, 119).

Praktik *Female Genital Mutilation* atau FGM di Mesir merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender yang membuktikan tidak dapat dipenuhinya *well-being* dari perempuan Mesir sebagai akibat dari struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai golongan inferior pada konstruksi sosial Mesir. Selain konsekuensi psikologis seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*), praktik FGM juga dapat menimbulkan permasalahan medis seperti pendarahan hebat yang pada akhirnya dapat menimbulkan kista dan infeksi (Elbendary dkk. 2021, 2).

Seakan menolak melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik FGM, para orang tua di Mesir masih memilih untuk terus melakukan FGM terhadap anak perempuan mereka agar kesucian sang anak dapat terjaga dengan alasan agama. FGM umumnya dilakukan ketika para perempuan Mesir masih berusia 7-12 tahun, usia yang masih belia untuk bisa mengerti mengenai konsekuensi dari praktik yang dijalani. Data statistik terkait FGM di Mesir menunjukkan bahwasannya dari tahun 2015 hingga 2022, praktik FGM di Mesir telah mengalami penurunan tetapi tidak secara signifikan. Survei Kesehatan

Demografi Mesir (EDHS) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 87% perempuan Mesir usia 15-49 tahun telah mengalami praktik FGM, sementara pada Survei Kesehatan Keluarga Mesir (EFHS) tahun 2022, angkanya menurun sebanyak 1% menjadi 86% (Hamdy et al. 2023, 3).

Terjadinya penurunan angka yang tidak signifikan pada praktik FGM di Mesir tidak terlepas dari meningkatnya medikalisasi praktik FGM di Mesir. Data statistik menunjukkan sebanyak 42% perempuan Mesir pada tahun 2015 menjalani praktik FGM melalui tenaga medis profesional, sementara pada tahun 2022 praktik FGM dengan tenaga medis profesional meningkat menjadi 47%. Di antara semua negara yang masih melakukan praktik ini, Mesir berada pada tingkat medikalisasi FGM tertinggi. Medikalisasi praktik FGM sebetulnya merupakan upaya dari Pemerintah Mesir untuk menurunkan angka kematian dari FGM yang tertuang dalam Dekrit Kementerian Kesehatan Mesir Tahun 1997. Dekrit Kementerian Kesehatan Mesir Tahun 1997 membatasi praktik FGM menjadi hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis profesional dan boleh dilakukan dengan alasan medis (Hamdy et al. 2023, 3).

Praktik FGM di Mesir kemudian dilarang secara hukum tahun 2008 melalui amandemen Pasal 242 KUHP. Namun pada amandemen tahun 2008 tersebut terdapat celah yang tidak menghilangkan pengecualian diperbolehkannya praktik FGM dengan syarat dilakukan untuk kepentingan medis (M. Arafa dan El-Ashry 2017, 68). Pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi, amandemen Pasal 242 KUHP kembali dilakukan pada tahun 2016. Amandemen yang dilakukan pada 2016 memperberat hukuman bagi pelaku dan pencabutan izin praktik bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam praktik FGM. Peraturan hukum mengenai

FGM kemudian diperbarui lagi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2021. Pada Undang-Undang yang terbaru terdapat penambahan hukuman penjara terhadap tenaga maupun instansi kesehatan yang terlibat dalam praktik FGM. Selain itu juga ada penambahan pasal yang mengatur mengenai pengenaan hukuman bagi masyarakat Mesir yang mempromosikan, mendorong, atau mengajak melakukan sunat perempuan (World Bank 2024, 156-157).

Berdasarkan amandemen yang dilakukan, dapat dikatakan Pemerintahan Presiden El-sisi sudah membentuk kerangka hukum yang cukup tegas dalam menangani FGM di Mesir. Namun hingga saat ini proses implementasi dari kerangka hukum yang terbentuk masih belum menunjukkan perkembangan. Hingga saat ini kasus terkait FGM yang sampai ke pengadilan merupakan kasus-kasus dengan kondisi korban yang sudah dalam kondisi kritis atau bahkan meninggal karena praktik FGM yang dijalani (Farouk 2021). Putusan akhir dari kasus praktik FGM yang sampai ke pengadilan pun tidak banyak mendapat publikasi. Kasus kematian Mayar Mohamed Moussa menjadi salah satu contoh kasus dari praktik FGM yang Putusan akhir dari pengadilan mendapat publikasi. Orang tua dari Moussa dan tenaga medis yang melakukan praktik tersebut divonis bersalah dan didenda masing-masing 1.000 Pounds Mesir dan 5.000 Pounds Mesir. Meskipun mendapat vonis bersalah dari pengadilan, para pelaku tidak menjalani hukuman penjara karena mendapatkan *suspended sentences* (Shutti 2017).

Obsesi terhadap kesucian perempuan yang berkaitan erat dengan norma kehormatan keluarga di Mesir menjadi penyebab dari mandeknya perkembangan pada penanganan praktik FGM. Norma kehormatan keluarga Mesir yang

menganggap FGM sebagai praktik yang akan membawa peluang pernikahan yang bagus bagi anak perempuan mereka, kemudian membuat para orang tua di Mesir takut akan stigma masyarakat yang akan dibebankan jika tidak melakukan praktik ini (Arafa et al. 2020, 855).

Selain permasalahan budaya yang mengakar, buruknya implementasi hukum dari kerangka hukum yang sudah terbentuk juga disebabkan oleh perbaikan kerangka hukum yang tidak disertai dengan adanya upaya peningkatan kesadaran akan bahaya dari FGM dan larangan yang sudah ditetapkan oleh hukum Mesir. Kurangnya pengetahuan akan bahaya dari FGM kemudian membuat medikalisasi pada praktik FGM di Mesir menjadi berkelanjutan. Hingga saat ini masih banyak orang tua di Mesir yang menganggap medikalisasi FGM merupakan solusi untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh FGM termasuk resiko kematian. Padahal faktanya, FGM yang dilakukan oleh tenaga medis tidak akan mengurangi resiko yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi maupun kematian bagi perempuan (Hamdy et al. 2023, 14).

Tidak hanya para orang tua, kekurangan pengetahuan akan bahaya dari FGM di Mesir juga terjadi di antara para tenaga medis profesional di Mesir. Di urban area Mesir sebesar 64% tenaga medis profesional ditemukan mengetahui bahaya dari FGM, sementara hanya sebesar 18% tenaga medis profesional di rural area Mesir yang mengetahui bahaya dari FGM. Kesenjangan pengetahuan tenaga medis profesional antara urban area dan rural area yang terjadi di Mesir menunjukkan peningkatan pendidikan mengenai FGM di kalangan tenaga medis profesional harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Mesir. Minimnya pengetahuan tenaga medis profesional terkait risiko yang dapat ditimbulkan FGM

berkontribusi pada keberlanjutan praktik ini, termasuk melalui pendekatan medis (Hamdy et al. 2023, 13).

Sejalan dengan yang dikatakan Galtung, kekerasan struktural terhadap perempuan Mesir dengan kategori *exploitation* B dapat dilihat dalam kasus FGM di Mesir. Para perempuan Mesir sebagai kelompok inferior yang tertindas oleh praktik FGM hingga menyakiti para perempuan Mesir baik itu melalui kecacatan pada organ genital maupun berupa trauma psikologis. Selama miss informasi terkait kesucian perempuan masih tersebar luas, ketimpangan struktur sosial Mesir yang menempatkan perempuan sebagai kelompok inferior akan terus terjadi.

3.1.2 Kekerasan Struktural yang Membahayakan Identity Needs

Kekerasan struktural yang membahayakan *identity needs* menjadi pembahasan lanjutan dari kekerasan struktural dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. *Penetration* menjadi salah satu kategori kekerasan struktural yang dapat membahayakan *identity needs* dalam penelitian ini. Galtung mendefinisikan *penetration* sebagai penanaman paham dari kelompok dominan kepada kelompok inferior hingga dapat merubah pandangan dari kelompok inferior. Penetrasi yang terjadi kemudian dapat membuat kelompok inferior kehilangan kesadarannya mengenai realita dari eksploitasi yang sedang dialami (Galtung 1990, 294).

Peran polisi moral yang dijalankan oleh *bawab* di Mesir, menjadi bentuk dari *penetration* yang terjadi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. Secara teknis *bawab* seperti *security* kebanyakan memiliki tugas sebagai penjaga keamanan, pemeliharaan umum

gedung, dan pekerjaan administratif bagi penyewa, *bawab* dalam dalam konstruksi sosial Mesir memiliki peran lain yang lebih penting yaitu sebagai penjaga dari norma kehormatan keluarga. Kehadiran norma kehormatan keluarga di Mesir yang menganggap kesucian perempuan sebagai kehormatan bagi keluarga dan bangsa menjadikan penghakiman moral yang dilakukan oleh *bawab* sangat sarat akan stereotip yang juga menanamkan stigma kepada para perempuan (Eid 2018).

Peran *bawab* dalam menjaga norma kehormatan keluarga di Mesir bukan hanya sebagai bagian dari konstruksi sosial, sebagai perpanjangan tangan dari pemilik bangunan peran *bawab* dalam menjaga norma kehormatan keluarga juga didasari oleh hukum tertulis. Pasal 18 UU No. 136 Tahun 1981 menyatakan ketika suatu bangunan digunakan dengan cara menimbulkan ketidaknyamanan bagi lingkungannya, maka kemudian masyarakat sekitarnya boleh melihat ke dalam bangunan yang disewa, atau jika bangunan digunakan dengan cara yang melanggar norma moral kekeluargaan, maka kasusnya harus mendapat putusan akhir di Pengadilan Mesir. Menurut Omar Halloum Pasal 18 UU No. 136 Tahun 1981 memberikan justifikasi untuk dapat membawa orang-orang yang dianggap telah melanggar norma moral kekeluargaan yang berkaitan dengan kehormatan keluarga (Eid 2018).

Stigma yang ditanamkan dan pengawasan ketat yang tertuju kepada para perempuan Mesir kemudian membuat para perempuan Mesir merasakan rasa hina terhadap dirinya apabila tidak mengikuti norma kekeluargaan yang berlaku. Pada tahun 2016, Identity Magazine menerbitkan keresahan dari seorang perempuan Mesir yang takut untuk pulang malam maupun pulang dengan diantar teman

laki-lakinya karena takut akan mendapat stigma sebagai ‘barang’ rusak oleh *bawab*. Perempuan yang sudah mendapat stigma sebagai ‘barang’ rusak dari *bawab*, biasanya akan mendapat kesulitan dalam prospek pernikahannya hingga kemudian akan mendapat stigma lainnya yaitu *hay'aneso* yang juga dikenal sebagai perawan tua dalam bahasa Indonesia. stigma yang diberikan oleh *bawab* kemudian membuat para perempuan di Mesir merasa seakan-akan ada seseorang yang akan menanyakan “Apa kata El Bawab kalau melihatmu pulang larut malam, berpakaian begitu, dan diantar seorang laki-laki?” (Khedre 2016).

Dalam kasus ini dapat dilihat *bawab* sebagai refleksi dari kelompok dominan memberikan stigma kepada para perempuan Mesir yang merupakan refleksi dari kelompok inferior, hingga kemudian merubah kepercayaan diri dan pandangan (menganggap diri sendiri hina) dari para perempuan Mesir sebagai kelompok inferior terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu penanaman stigma yang dilakukan oleh *bawab* di Mesir terhadap moralitas kehormatan perempuan Mesir dapat dikategorikan sebagai *penetration* dari kekerasan struktural yang terjadi terhadap perempuan mesir pada masa Pemerintahan El-sisi.

Selain *penetration*, *segmentation* merupakan kategori lainnya dari kekerasan struktural yang dapat membahayakan *identity needs* dalam penelitian ini. Sama seperti *penetration*, *segmentation* juga dapat membuat kelompok inferior kehilangan kesadarannya mengenai realita dari kekerasan yang sedang dialami. Menurut Galtung *segmentation* dapat diartikan sebagai proses pengelompokan kelompok-kelompok inferior yang berdampak pada terbatasnya akses informasi mereka sebagai pengalihan perhatian dari realitas yang sesungguhnya (Galtung 1990, 294).

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi, peran perempuan dalam masyarakat daerah Gurun Siwa menjadi bentuk *segmentation* yang terjadi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir. Masyarakat siwa atau juga dikenal sebagai Siwan merupakan etnis asli dari Gurun Siwa yang juga menjadi salah satu etnis Muslim non Arab di Mesir. Daerah Gurun Siwa yang terletak di *Governorate* Marsa Matrouh, merupakan daerah wisata yang perekonomiannya sedang berkembang karena sektor pariwisatanya selama 10 tahun terakhir. Meskipun begitu pada saat yang bersamaan sebagian besar perempuan Siwa masih dibatasi untuk berinteraksi dengan pengunjung dari luar (Shafiek 2022, 28).

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 terkait perempuan Siwa pada masyarakat Siwa dalam perspektif laki-laki siwa menunjukkan meskipun perkembangan pariwisata membawa peluang ekonomi baru dan sedikit menggeser dinamika gender, perempuan Siwa masih menghadapi pembatasan sosial yang ketat dan harus bernegosiasi untuk mendapatkan ruang lebih dalam batasan budaya yang ada. Para perempuan Siwa umumnya berperan dalam ranah domestik dengan mobilitas yang sangat terbatas, terutama bagi perempuan yang sudah menikah yang lebih banyak beraktivitas di dalam rumah (Shafiek 2022, 30–31).

Berdasarkan tradisi, para perempuan Siwa tidak diperbolehkan untuk pergi ke pasar. Laki-laki dalam keluarga baik itu suami maupun ayah dari perempuan Siwa yang akan pergi ke pasar untuk menyediakan kebutuhan dari perempuan di keluarganya. Salah seorang narasumber penelitian bahkan menganggap perempuan Mesir lainnya yang bukan berasal dari etnis siwa sebagai ancaman dan melarang istrinya untuk bertemu dengan mereka. Larangan untuk pergi keluar

muncul karena bertemu dengan orang asing merupakan sebuah sikap yang tidak dapat diterima masyarakat sehingga selain dengan keluarganya para perempuan Siwa hanya dapat berkumpul dengan sesama perempuan Siwa (Shafiek 2022, 31).

Larangan bagi perempuan Siwa untuk dapat bersosialisasi dengan orang lain yang bukan berasal dari Siwa mencerminkan kekerasan struktural berbentuk *segmentation* pada kasus kekerasan terhadap perempuan mesir. Sejalan dengan yang dipaparkan oleh Galtung, *segmentation* yang terjadi membuat para perempuan Mesir mengalami keterbatasan dalam hal penerimaan informasi. terbatasnya informasi yang diterima kemudian membuat kelompok inferior kehilangan kesadarannya mengenai realita dari kekerasan yang sedang dialami (Galtung 1990, 294).

3.1.3 Kekerasan Struktural yang Membahayakan Freedom Needs

Marginalisation menjadi bentuk kekerasan struktural yang tidak dapat memenuhi *freedom needs* dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. Menurut Galtung *marginalisation* merupakan tindak pengucilan terhadap kelompok inferior melalui pengabaian hak dari kelompok inferior, hingga kelompok inferior terpinggirkan dalam sistem sosial. Tersingkirnya kelompok inferior dalam sistem sosial kemudian membuat terminimalisir nya partisipasi sosial dari kelompok inferior sehingga pergerakan yang dapat melawan kekerasan yang terjadi tidak dapat terbentuk (Galtung 1990, 294).

Bentuk dari *marginalisation* dapat terlihat melalui masih rendahnya kesempatan dan partisipasi perempuan Mesir dalam perekonomian. Hak

perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dalam bidang ekonomi sudah terjamin dalam Konstitusi Mesir Pasal 11 Tahun 2014. Selain itu, pada Pasal 68 Konstitusi Mesir Tahun 2014 secara khusus juga telah menjamin dukungan negara untuk dapat membuka kesempatan bagi perempuan Mesir dalam bekerja dan menduduki jabatan publik serta posisi manajerial tinggi tanpa diskriminasi (Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, arts. 11 dan 68). Meskipun begitu, global gender gap report yang keluar di tahun 2024 menunjukkan Mesir masih memiliki 59.4% kesenjangan gender dalam bidang ekonomi. Data statistik perempuan yang menduduki jabatan manajerial tinggi juga masih berada pada angka 16.2% sehingga dapat dikatakan pemenuhan hak perempuan Mesir dalam mendapatkan kesetaraan di bidang ekonomi masih belum terpenuhi (World Economic Forum 2024, 33).

Tidak terpenuhinya hak politik dari para perempuan Mesir menjadi bentuk lainnya dari *marginalisation* pada kekerasan struktural di masa Pemerintahan Presiden El-sisi. Pemenuhan hak komunikasi politik menjadi salah satu indikator penentu dalam pemenuhan hak politik. Agar hak komunikasi politik dapat terpenuhi, media dan masyarakat sipil harus bisa mendapatkan *freedom of speech* di mana media dan masyarakat sipil dapat memberikan kritik terhadap pemerintah serta menyampaikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah (Ziegenhain dan Enkhtaivan 2024, 77).

Pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi, aktivis perempuan yang merupakan ujung tombak dalam perjuangan hak perempuan di Mesir, menjadi golongan yang paling rentan terhadap pengabaian hak. Kerentanan yang mengikuti para aktivis perempuan Mesir bukan hanya karena kegiatan aktivisme

yang mereka lakukan, tetapi juga karena gender yang mereka miliki sebagai seorang perempuan. Para aktivis perempuan yang menyuarkan hak perempuan Mesir di luar dari batas yang ditetapkan pemerintah kerap mengalami represi yang keras (Labastie 2024).

Penahanan Amal Fathy merupakan salah satu contoh kasus pengabaian hak aktivis perempuan Mesir yang terjadi bukan hanya karena kegiatan aktivisme yang mereka lakukan, tetapi juga karena gendernya sebagai perempuan. Tindak penahanan terhadap Fathy yang dilakukan karena memposting video mengenai pengalamannya mengalami pelecehan seksual di tempat umum, merupakan pengabaian dari hak politiknya yaitu *Freedom of speech*. Hak dalam kebebasan berpendapat sendiri juga terjamin dalam Konstitusi Mesir Pasal 65 mengenai kebebasan berpikir yang berbunyi, setiap warga negara memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya melalui ucapan, tulisan, gambar, atau melalui cara lainnya sebagai bentuk ekspresi dan publikasi (Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, art. 65).

Selain hak politiknya dalam hal kebebasan berpendapat terabaikan, sebelum peristiwa penahanan terjadi sudah ada pengabaian hak yang terlebih dahulu terjadi yaitu hak Fathy sebagai seorang perempuan untuk dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Hak terlindung dari segala bentuk kekerasan bagi perempuan Mesir dijamin dalam Pasal 11 Konstitusi Mesir Tahun 2014 yang berbunyi, Negara berkomitmen untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, serta menjamin pemberdayaan perempuan agar mereka dapat menyeimbangkan peran sebagai anggota keluarga dengan tuntutan pekerjaan (Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, art. 11). Meskipun telah

terjamin untuk dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan melalui Pasal 11 dari Konstitusi Mesir Tahun 2014, Amal Fathy sebagai penyintas dari kekerasan seksual justru malah mendapat tuntutan atas *insulting public decency* karena menceritakan pengalaman pelecehannya di sosial media (BBC News 2018).

Marginalization sebagai kategori dari kekerasan struktural dalam kasus Amal Fathy dapat dilihat melalui pengabaian hak yang terjadi pada saat sebelum maupun sesudah penahanan dilakukan. Pengabaian hak yang dialami Amal Fathy kemudian dapat menimbulkan dampak berupa minimnya partisipasi sosial dari perempuan Mesir. Rasa tidak aman yang ditimbulkan oleh pengabaian hak kemudian membuat pergerakan perempuan yang dapat melawan kekerasan yang terjadi tidak dapat terbentuk hingga kekerasan terus berlanjut. Penindasan terhadap *grassroots movement* dan ketidakmauan pemerintah untuk mendengarkan para aktivis perempuan Mesir yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil independen akan terus memperlambat kemajuan hak-hak perempuan Mesir (Labastie 2024).

3.2 Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan Mesir

Seperti yang tergambar pada Gambar 1, kekerasan langsung tergolong ke dalam kekerasan yang dapat dilihat peristiwa dan faktanya secara langsung. Kekerasan langsung juga diartikan Galtung sebagai sebuah peristiwa yang menjadi gambaran bagi kekerasan struktural dan kekerasan kultural (Galtung 1990, 294). Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang muncul ketika perbedaan antara apa yang mungkin terjadi dan kenyataan yang dialami tidak lagi diperhatikan, sehingga tindakan seperti pembunuhan atau upaya

mencederai orang lain termasuk ke dalam kategori kekerasan langsung (Galtung 1969, 169).

Sama seperti kekerasan struktural, sebagaimana dipaparkan pada tabel 2, kekerasan langsung juga dibagi ke dalam 4 kategori pemenuhan kebutuhan hidup, *survival needs*, *well-being needs*, *identity needs*, dan *freedom needs*. Tidak terpenuhinya kebutuhan bertahan hidup yang paling dasar yaitu survival need, dalam kekerasan langsung disebut dengan *killing*. Pemusnahan massal, *holocaust*, dan genosida juga dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari killing. Galtung juga memasukan tindakan yang secara sengaja membuat kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan masyarakat miskin merasakan kelaparan, kesulitan dalam mendapat akses kesehatan, ke dalam bentuk lainnya dari *killing* (Galtung 1990, 292-293).

Tidak terpenuhinya *well-being needs* atau tindak kekerasan yang meninggalkan luka fisik disebut sebagai maiming. Pengepungan atau blokade serta sanksi yang terlihat seperti aksi non violence, termasuk ke dalam bentuk dari maiming. Tidak terpenuhinya *Identity needs* atau pengelompokan yang mengasingkan suatu kelompok terbagi lagi menjadi tiga yaitu *desocialization* atau upaya pengasingan budaya, *resocialization* atau pemaksaan pergantian budaya, dan *secondary citizen* atau pemaksaan penggunaan budaya yang dominan. sementara itu tidak terpenuhinya *freedom needs* dalam kekerasan langsung juga kembali dibagi menjadi 3 yaitu *repression* atau pembatasan kebebasan, *detention* atau penahanan dalam tahanan, dan juga *expulsion* atau pengusiran (Galtung 1990, 293).

Killing, maiming, repression, dan detention merupakan 3 kategori kekerasan langsung yang akan dibahas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. *Survival needs, well-being needs* dan *freedom needs* menjadi tiga kelas kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat terpenuhi pada kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi.

3.2.1 Kekerasan Langsung yang Membahayakan Survival Needs

Killing atau peristiwa tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu keberlangsungan hidup dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi dapat dilihat melalui kasus pembunuhan demi kehormatan yang terjadi di Mesir. Pembunuhan demi kehormatan sendiri dapat diartikan sebagai pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-lakinya, karena dianggap telah melanggar norma sosial yang berkaitan dengan seksualitas, atau karena adanya dugaan bahwa perempuan tersebut telah melampaui batas perilaku sosial yang ditetapkan oleh tradisi (Khafagy 2005, 5).

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi pembunuhan demi kehormatan dapat dilihat pada kasus pembunuhan seorang dokter perempuan oleh *bawab* yang menjaga apartemennya, pemilik gedung, dan tetangganya. Dokter perempuan diduga didorong dari balkon lantai enam apartemennya setelah mengundang rekan kerja laki-laki ke dalam unit tempat tinggalnya. pemilik apartemen, petugas penjaga gedung (*security gedung*), dan seorang tetangga memaksa masuk ke

apartemennya, kemudian memukulnya. Dalam insiden tersebut, ia terjatuh atau didorong dari balkon saat penyerangan terjadi (Pleasance 2021).

Hadirnya peristiwa pembunuhan demi kehormatan di Mesir tidak terlepas dari peran norma kehormatan keluarga di Mesir yang membebaskan perempuan Mesir pada kewajiban sebagai perwujudan kehormatan bangsa. perempuan dituntut untuk menjalankan norma moral sebagaimana mestinya, sehingga perempuan akan dianggap sebagai pembawa kehormatan keluarga bahkan kehormatan nasional. Sementara itu jika nilai-nilai moral tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka stigma yang mempertanyakan martabat dan rasa malu akan mengikuti perempuan yang tidak menjalankannya (Martinelli 2022, 3).

Dalam kasus pembunuhan dokter perempuan pada tahun 2021 lalu, pembunuhan demi kehormatan dapat terjadi karena korban telah dianggap melanggar norma kehormatan keluarga di Mesir dengan menerima teman laki-laki bertemu di rumah (Wahdan 2021, 32). Peristiwa tersebut sejalan dengan penjelasan dari Galtung, bahwasannya norma dan budaya dari kekerasan kultural dapat menjadi akar penyebab dari terjadinya kekerasan langsung (Galtung 1990, 292).

3.2.2 Kekerasan Langsung *Well-being Needs*

Maiming menjadi kategori dari kekerasan langsung yang membahayakan *well-being needs* dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa pemerintahan Presiden El-sisi. Menurut Galtung *maiming* bekerja melalui mekanisme yang dapat melukai secara fisik dan mengancam kesejahteraan dari para korban. Tidak hanya sebagai kekerasan yang dapat meninggalkan luka fisik, Galtung berpendapat bahwasannya *Siege/Sanctions* (blokade atau sanksi) yang

terlihat sebagai aksi *non-violence*, merupakan bagian dari tindak kekerasan *maiming*. Bentuk kekerasan dari *Maiming* memperpanjang rantai sebab-akibat (*causal chain*), sehingga pelaku dapat menghindari konfrontasi langsung dengan kekerasan itu sendiri. Korban pun dipaksa untuk menyerah, bukan karena kehilangan nyawa atau anggota tubuh, tetapi karena kehilangan kebebasan dan identitas (Galtung 1990, 293).

Female Genital Mutilation atau FGM di Mesir merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender yang membuktikan tidak dapat dipenuhinya *well-being needs* dari perempuan Mesir dalam kekerasan langsung. Dampak langsung dari FGM dapat mencakup syok, pendarahan, dan gangguan psikologis yang mendalam, yang semakin diperparah jika prosedur dilakukan oleh orang yang tidak terlatih atau dalam kondisi tidak higienis, sehingga menyebabkan infeksi. Selain itu, dampak jangka panjang dari praktik FGM juga meliputi nyeri kronis, terbentuknya keloid, fibrosis, peningkatan risiko komplikasi saat melahirkan, infertilitas primer, serta trauma psikologis yang berkepanjangan (Hamdy et al. 2023, 3). Meskipun sudah menjadi praktik yang ilegal di Mesir, pada Juni 2019 hingga Desember 2020 Egypt's National Council for Women (NCW) dan National Council for Childhood and Motherhood (NCCM) mendapat 1618 laporan terkait fatalitas yang terjadi saat praktik FGM dilakukan (UN Women 2021).

Pengalaman yang dialami oleh putri dari Naja, seorang ibu dari kota Assiut yang harus melihat putrinya berada dalam kondisi kritis selama 10 hari merupakan salah satu penggambaran nyata dari bahaya medis yang ditimbulkan oleh praktik FGM. Pada tahun 2019 lalu, Naja membawa putrinya yang pada saat

itu berusia 9 tahun ke dokter untuk menjalankan prosedur FGM dengan harapan akan mengurangi resiko komplikasi dari praktik tersebut. Namun, pada saat praktik dijalankan yang terjadi justru sebaliknya, anak dari Naja mengalami pendarahan hebat yang berlangsung selama 10 hari dan hampir meregang nyawa (Younis 2023).

Dengan demikian, praktik FGM di Mesir tidak hanya mencerminkan kekerasan berbasis gender, tetapi juga merupakan manifestasi konkret dari kekerasan langsung dalam bentuk *maiming* sebagaimana dimaknai oleh Galtung. Dampak medis dan psikologis yang ditimbulkan, seperti pada kasus anak Naja, menunjukkan bahwa tubuh perempuan menjadi arena kekerasan yang diperpanjang, di mana penderitaan tidak hanya hadir dalam bentuk luka fisik tetapi juga dalam kehilangan otonomi, kebebasan, dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam konteks ini, FGM beroperasi sebagai instrumen yang tidak hanya melanggengkan subordinasi perempuan, tetapi juga secara langsung melanggar hak perempuan atas integritas tubuh dan pemenuhan kebutuhan hidup (*well-being needs*). Oleh karena itu, *maiming* sebagai kekerasan langsung menjadi lensa yang krusial untuk memahami bagaimana sistem sosial dan medis di Mesir turut mereproduksi penderitaan perempuan dalam Rezim El-sisi yang menormalisasi kontrol terhadap tubuh mereka.

3.2.3 Kekerasan Langsung Freedom Needs

Repression dan *detention* merupakan dua kategori kekerasan langsung yang tidak dapat memenuhi *freedom needs* dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi. *Repression* dapat didefinisikan melalui dua definisi yaitu, pembatasan terhadap *freedom from* atau

pembatasan kebebasan dari kekerasan dan pembatasan terhadap *freedom to* atau pembatasan kebebasan untuk bertindak. Sementara itu Galtung mendefinisikan *detention* sebagai pengurungan manusia ditempat tertutup seperti penjara atau kamp konsentrasi yang menjadi wujud nyata yang dapat terlihat dari kekerasan struktural (Galtung 1990, 293).

Penangkapan seorang aktivis perempuan pada 11 Mei 2018, Amal Fathy, menjadi realisasi nyata dari bentuk kekerasan langsung yang dapat membahayakan *freedom needs*. Fathy ditangkap di kediamannya di Kairo setelah memposting 12 menit video yang menceritakan pelecehan seksual yang baru dialaminya saat pergi ke bank di laman facebooknya (Amnesty International 2022).

Dalam video yang diunggah, Fathy menceritakan bagaimana dirinya mengalami pelecehan seksual saat mengunjungi sebuah bank, serta mengkritik kegagalan pemerintah Mesir dalam melindungi perempuan Mesir. Dua hari setelah unggahan tersebut, pasukan keamanan Mesir melakukan penggerebekan dini hari ke rumahnya. setelah ditangkap, Fathy menjalani penahanan pra persidangan selama 6 bulan .Persidangan Fathy baru dilakukan pada Desember 2018 dengan dakwaan telah menyebarkan hoax yang dianggap merugikan negara Mesir dan *insulting public decency* karena memiliki video yang tidak senonoh. Fathy kemudian dijatuhi hukuman satu tahun penjara untuk masing-masing dakwaan, serta denda sebesar 10.000 pound Mesir (Michaelson 2018).

Kasus penangkapan Amal Fathy merupakan refleksi dari tidak terpenuhinya *freedom needs* dari perempuan Mesir sebagai bagian dari kekerasan langsung yang dapat terlihat dengan jelas. Sebagaimana dikemukakan oleh

Galtung *detention* sebagai kategori dari kekerasan langsung pada kasus Fathy dapat dilihat dengan sangat jelas melalui penangkapan dan penahanan Fathy setelah mengunggah video yang menceritakan pelecehan seksual yang baru saja dialaminya. Sementara itu, *repression* sebagai kategori dari kekerasan langsung pada kasus Fathy dapat dilihat melalui pelanggaran terhadap *freedom from fear* atau kebebasan dari intimidasi. Penahanan yang dilakukan terhadap Fathy yang berstatus sebagai penyintas kekerasan seksual menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kebebasan dari intimidasi. Selain itu penanaman stigma yang dilakukan oleh *bawab* terhadap para perempuan Mesir yang dianggap telah melanggar norma kesucian yang berasal dari moralitas nilai kekeluargaan juga merupakan bentuk lainnya dari pelanggaran terhadap *freedom from fear*. Dalam kasus Amal Fathy *repression* juga dapat terlihat melalui pelanggaran terhadap *freedom to speak*.

Tabel 3. Tipologi Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan di Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden El-sisi

	<i>Survival Needs</i>	<i>Well-being Needs</i>	<i>Identity Needs</i>	<i>Freedom Needs</i>
<i>Direct Violence</i>	Killing Pembunuhan demi kehormatan seorang dokter perempuan pada 2021	Maiming Praktik FGM yang menyebabkan seorang anak perempuan mengalami pendarahan pada 2019 Siege, Tidak ditemukan Sanctions Tidak ditemukan Misery Tidak ditemukan	Desocialization Tidak ditemukan Resocialization Tidak ditemukan Secondary Citizen Tidak ditemukan	Repression pelanggaran terhadap <i>freedom from fear</i> pada penahanan Amal Fathy di 2018 kasus penanaman stigma oleh <i>bawab</i> dan pelanggaran terhadap <i>freedom to speak</i> pada kasus penuntutan terhadap Fathy di 2018
<i>Structural Violence</i>	Exploitation A Tidak ditemukan	Exploitation B Buruknya implementasi hukum yang mengatur mengenai larangan praktik FGM	Penetration Penanaman stigma terhadap perempuan oleh <i>bawab</i> Segmentation Larangan bagi perempuan Siwa untuk keluar rumah dan bersosialisasi dengan 'orang asing'	Marginalization Pengabaian hak kebebasan berbicara dan hak terlindung dari segala bentuk kekerasan pada kasus Amal Fathy Fragmentation Tidak ditemukan

Diolah dari jurnal *cultural violence* (Galtung 1990, 292)

Seperti yang tertera pada tabel 3, bentuk kekerasan yang terjadi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi terbagi ke dalam tipologi empat kelas kebutuhan dasar yang membedakan

kekerasan struktural dan kekerasan langsung. *Well-being needs*, *identity needs*, dan *freedom needs* menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam kekerasan struktural yang terjadi terhadap perempuan Mesir. Pelanggaran terhadap *well-being needs* terjadi dalam bentuk *exploitation* B yang membahayakan kesejahteraan dari perempuan Mesir sebagai akibat dari buruknya implementasi hukum yang mengatur mengenai larangan praktik FGM. Pelanggaran *identity needs* dalam kasus ini terjadi dalam bentuk *penetration* dan *segmentation* yang menyebabkan para perempuan Mesir kehilangan kesadarannya mengenai realita dari kekerasan yang sedang dialami. Sementara itu, pelanggaran terhadap *freedom needs* dalam kasus ini dapat dilihat melalui bentuk *marginalization* yang mengabaikan hak kebebasan berpendapat dan hak terlindung dari segala bentuk kekerasan (Galtung 1990, 294).

Pelanggaran terhadap *survival needs*, *well-being needs*, dan *freedom needs* merupakan pelanggaran dari kebutuhan dasar yang terjadi dalam kekerasan langsung pada kasus kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan El-sisi. Pelanggaran *survival needs* dalam kekerasan langsung yang terjadi pada kasus ini berbentuk *killing* atau lebih tepatnya kasus pembunuhan demi kehormatan seorang dokter perempuan Mesir pada tahun 2021. Kemudian dalam kekerasan langsung yang melanggar *well-being needs* dapat terlihat melalui bentuk *maiming* yang menyiksa salah seorang anak melalui praktik FGM yang menyebabkan pendarahan selama 10 hari pada tahun 2019. Pelanggaran terhadap *freedom needs* dalam kekerasan langsung yang terjadi pada kasus ini berbentuk *detention* dan *repression* yang dapat terlihat pada kasus penangkapan dan penahanan terhadap Amal Fathy, aktivis perempuan Mesir.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

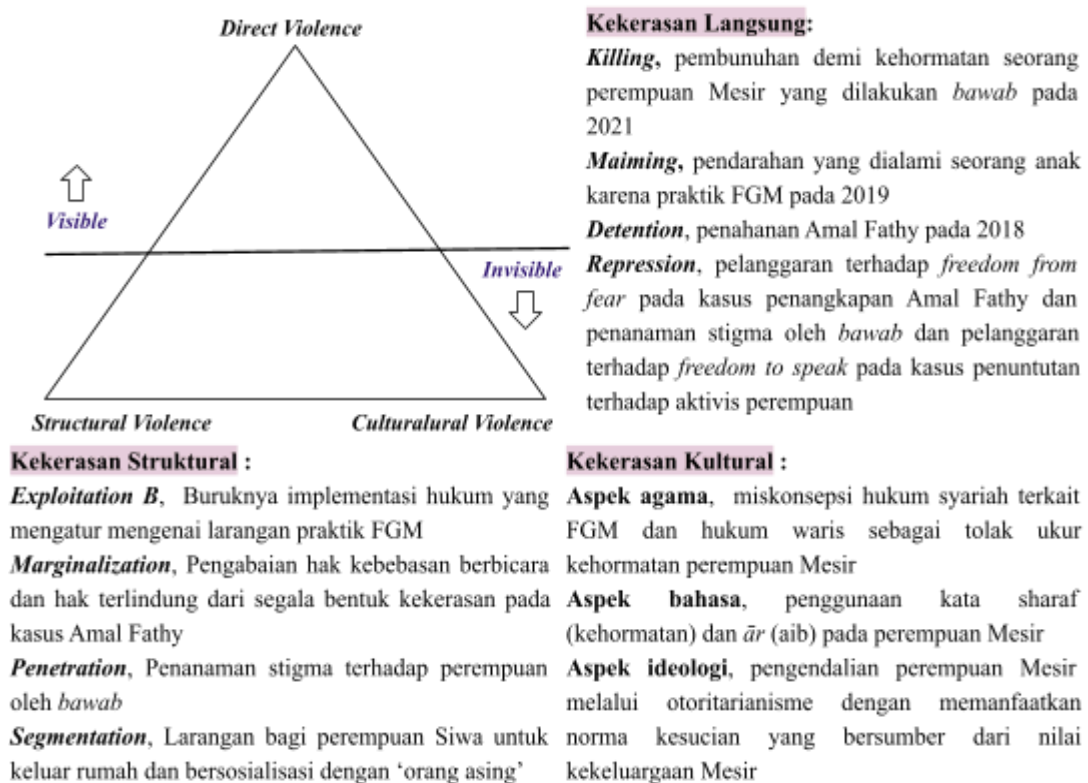
Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Mesir telah terjadi sejak lama. Untuk menghadapi isu tersebut Pemerintahan Mesir di bawah Presiden Hosni Mubarak meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 1981. Meskipun begitu, sejak saat meratifikasi CEDAW hingga pergantian rezim terjadi di Mesir melalui Revolusi pada 2011, kekerasan terhadap perempuan Mesir masih terus berlanjut.

Revolusi Mesir pada 2011 seharusnya menjadi kemenangan sipil bagi rakyat Mesir karena telah berhasil menggulingkan Rezim Mubarak yang otoriter. Konstitusi Mesir yang disahkan pada 2014 telah memberikan jaminan hak perlindungan terhadap perempuan merupakan hasil dari revolusi yang terjadi. Namun, hingga Rezim transisi berganti ke kepemimpinan dari Presiden Abdul Fattah El-sisi tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan Mesir. Kekerasan terhadap perempuan Mesir yang terus berlanjut mendorong penulis untuk melakukan penelitian melalui teori tipologi kekerasan oleh Johan Galtung mengenai Bagaimana tinjauan segitiga kekerasan pada perempuan Mesir di Masa Pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi?

Penelitian yang penulis lakukan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa kekerasan terhadap perempuan Mesir pada masa Pemerintahan Presiden El-sisi dapat didefinisikan melalui teori tipologi atau segitiga kekerasan oleh Johan Galtung. Segitiga kekerasan yang dipaparkan Galtung membagi kekerasan ke

dalam 3 jenis kekerasan, yaitu kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung.

Gambar 2. Bentuk Segitiga Kekerasan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Mesir pada Masa Pemerintahan Presiden El-sisi



Diolah dari Galtung (1990)

Terdapat 3 aspek dari kekerasan kultural pada kasus ini, yaitu aspek agama, aspek ideologi, dan aspek bahasa. Dalam aspek agama, miskonsepsi hukum syariah islam terkait FGM dan hukum waris sebagai tolak ukur dari nilai perempuan Mesir di masyarakat, memenuhi dikotomi ‘*God chooses*’ dan *the unchosen*. Pengendalian perempuan Mesir melalui ideologi otoritarianisme dengan memanfaatkan norma kesucian terhadap perempuan sebagai bentuk

nasionalisme dalam upaya menjaga martabat bangsa, menjadi aspek ideologi dari kekerasan kultural yang memenuhi dikotomi *self* dan *other*. Pada aspek bahasa, penggunaan kata *sharaf* (kehormatan) dan *ār* (aib) pada perempuan Mesir, memenuhi dikotomi *essence* dan *apparition*.

Pelanggaran terhadap *well-being needs*, *identity needs*, dan *freedom needs* merupakan macam-macam pelanggaran kebutuhan dasar yang menentukan terjadinya kekerasan struktural pada kekerasan terhadap perempuan Mesir. *Exploitation B* yang merupakan bentuk pelanggaran *well-being needs* yang tergambar pada buruknya implementasi hukum di masa Pemerintahan El-sisi yang mengatur larangan dari praktik FGM di Mesir. *Penetration* dan *segmentation* menjadi bentuk kekerasan yang melanggar *identity needs* dari perempuan Mesir. Pada tahun 2016, penanaman stigma terhadap perempuan oleh *bawab* hingga menimbulkan rasa hina terhadap diri perempuan tergambar dalam *penetration*, sedangkan larangan bagi perempuan Siwa untuk keluar rumah dan bersosialisasi dengan ‘orang asing’ menjadi gambaran nyata bagi *segmentation*. Sementara itu, pengabaian hak kebebasan berbicara dan hak terlindung dari segala bentuk kekerasan pada kasus Amal Fathy merupakan gambaran nyata dari *marginalization* pada kasus ini.

Dalam kekerasan langsung, pelanggaran terhadap *survival needs*, *well-being needs*, dan *freedom needs* merupakan macam-macam pelanggaran terhadap kebutuhan dasar yang menjadi penentu dari kekerasan langsung. *killing* merupakan bentuk pelanggaran terhadap *survival needs* yang dapat terlihat melalui kasus pembunuhan dengan kehormatan terhadap seorang dokter perempuan Mesir pada 2021 lalu. Pelanggaran terhadap *well-being needs* dari

perempuan Mesir tampak dalam bentuk *maiming*, seperti yang dialami seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang mengalami pendarahan selama 10 hari setelah menjalani praktik FGM pada 2019. Pelanggaran terhadap *freedom needs* dalam kekerasan langsung yang berbentuk *detention* tampak pada penahanan terhadap Amal Fathy, aktivis perempuan Mesir. Sementara itu, pelanggaran terhadap *freedom needs* yang berbentuk *repression* dalam kasus ini tampak dalam pelanggaran terhadap *freedom from fear* dan *freedom to speak* berupa penangkapan yang dilakukan terhadap Fathy pada 2018 lalu yang berstatus sebagai penyintas kekerasan seksual dan penanaman stigma yang dilakukan oleh *bawab* terhadap para perempuan Mesir.

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Abdul Fattah El-Sisi, telah terjadi kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung terhadap perempuan Mesir, yang ditunjukkan melalui terpenuhinya berbagai aspek dalam tiga jenis kekerasan pada segitiga kekerasan Galtung. Kekerasan kultural sebagai kekerasan yang telah lama terjadi melalui aspek agama, ideologi, dan bahasa menjadi justifikasi dari 2 kekerasan lainnya dengan sifat kekerasan menetap juga sulit diubah. Justifikasi yang diberikan oleh kekerasan kultural berlanjut menjadi *exploitation*, *penetration*, *segmentation*, dan *marginalization* yang merupakan bentuk-bentuk dari kekerasan struktural yang berproses dan berlangsung secara terus-menerus, kadang menguat, kadang melemah. Dari kekerasan yang terus berproses pada kekerasan struktural, kekerasan langsung kemudian muncul sebagai peristiwa yang nyata dan terjadi hanya saat kekerasan berlangsung.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian yang penulis lakukan masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu penulis menyarankan beberapa rekomendasi penelitian selanjutnya untuk dapat melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini. Pertama, untuk menyempurnakan analisis struktural mengenai buruknya implementasi hukum yang melindungi perempuan Mesir dari kekerasan, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk melakukan analisis pada efektivitas kebijakan dari Presiden El-sisi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Mesir. Selain itu penulis juga merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya melakukan analisis terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintahan dari Presiden El-sisi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan Mesir.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi, Ardila Putri, dan Zulkifli Harza. 2022. "Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Paska Revolusi Mesir 2011." *Jurnal PIR : Power in International Relations* 7 (1): 13.
<https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.13-30>.
- Al Jazeera. 2022. "Who Is Alaa Abd El-Fattah and Why Is He Imprisoned in Egypt?" Al Jazeera, November.
<https://www.aljazeera.com/news/2022/11/9/who-is-alaa-abd-el-fattah-and-why-is-he-imprisoned-in-egypt-explainer>.
- Al-Anani, Khalil. 2022. "Sisi's Appropriation of Islam Undermines Egypt's Religious Soft Power." Berkleycenter.Georgetown.Edu, April 5.
<https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/sisi-s-appropriation-of-islam-undermines-egypt-s-religious-soft-power?>
- Amnesty International. 2022. "Egypt: Hopes for Justice Crushed as Court Confirms Prison Term for Women's Rights Defender." Amnesty.Org, Januari 12.
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/01/egypt-hopes-for-justice-crushed-as-court-confirms-prison-term-for-womens-rights-defender/>.
- Anwar, Ilham Choirul. 2023. "Apa Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Faktor Penyebabnya?" Tirto.id, November 27.
<https://tirto.id/apa-dampak-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-faktor-penyebabnya-gSEf>.
- Arab Republic of Egypt. 2022. *Egypt Family Health Survey EFSH 2021*. Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
https://www.capmas.gov.eg/pdf/new_Pdf/2022112910727_health.pdf.
- Arafa, Ahmed, Alshimaa Mostafa, dan Ehab S. Eshak. 2020. "Prevalence and Risk Factors of Female Genital Mutilation in Egypt: A Systematic Review." *Clinical Epidemiology and Global Health* 8 (3): 850–57.
<https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.02.012>.
- Arafa, Mohamed, dan Ahmed El-Ashry. 2017. "Gender Equality in the Arab and Muslim World." Dalam *Gender Equality in a Global Perspective*, 1 ed. Routledge Advances in Management and Business Studies. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315639505-3>.
- BBC News. 2018. "Amal Fathy: Egypt Court Imposes Jail Term over Harassment Video." World - Middle East. *BBC News*, Desember 31.
<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46720727>.
- Constitution of the Arab Republic of Egypt, Egyptian Constitution (2014).
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?

- Darwish. 2015. “خلفة البنات’ فى الأساطير الشعبية.. جلابة رزق ومشروع فضيحة.” “اليوم السابع” Oktober 4.
<https://www.youm7.com/story/2015/10/4/-الأساطير-الشعبية-جلابة-خلفة-البنات-فى-الأساطير-الشعبية-جلابة-2373201/رزق-ومشروع-فضيحة/>.
- Eid, Menna. 2018. *Egypt’s Obsession With Their Neighbors*. Ehky Ya Masr | a Narrative Podcast about Life in Egypt. Februari 12.
<https://higherpodcasts.com/episode/tagsoundcloud2010tracks398491053>.
- Elbendary, Reham Nafad, Dina Ali Shokry, Wessam Sayed Deeb, dan Enas Mohamed Morsi. 2021. “Female Genital Mutilation (FGM): Is It Still an Existing Problem in Egypt?” *Forensic Science International* 318 (Januari): 110574. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110574>.
- Elsaman, Radwa. 2020. “Women’s Rights In Egyptian Law: The Legal Battle For A Safer Life.” *Middle East – Topics & Arguments* 14: 117–25.
<https://doi.org/10.17192/meta.2020.14.8242>.
- Eltahawy, Mona. 2016. *Headscarves and Hymens: Why the Middle East Needs a Sexual Revolution*. Weidenfeld & Nicolson.
- Ercoskun, Burak. 2021. “On Galtung’s Approach to Peace Studies.” *Lectio Socialis* 5 (1): 1–8. <https://doi.org/10.47478/lectio.792847>.
- Farouk, Menna A. 2021. “Egypt’s cabinet toughens law banning female genital mutilation.” Thomson Reuters Foundation, Januari 21.
<https://news.trust.org/item/20210121101656-qsqy3>.
- Fidhayanti, Dwi, Muhammad Muhammad, Mahbub Aunur Rofiq, Muhammad Robith Fuadi, Abdul Hakim, dan Nabrisatul Chusna Bil Makkisy. 2024. “Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur’an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35 (1): 37–56. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>.
- Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research.” *Journal of Peace Research* 6 (3): 167–91. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.
- Galtung, Johan. 1990. “Cultural Violence.” *Journal of Peace Research* 27 (3): 291–305. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>.
- Hamdy, Ahmed, Ahmed Taha Aboushady, Hatem Ibrahim Abd El Moty, Mohammed Omar Mostafa ELShobary, Yasmin Bassiouny, dan Amira Aly Hegazy. 2023. “Knowledge, Attitudes, and Practices of Female Genital Mutilation / Cutting among Healthcare Providers in Two Public Hospitals in Egypt: A Cross-Sectional Study.” *PLOS Global Public Health* 3 (12): 0002724. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002724>.
- Herawati, Ratna, Ani Purwanti, dan Sekar Anggun Gading Pinilih. 2021. “The Bill Elimination on Sexual Violence: Importance for Indonesian Women.”

International Journal of Criminology and Sociology 10 (Maret): 687–94.
<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.81>.

- Ibn Kathir. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. With Abdullah Bin Muhammad. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
https://drive.google.com/file/u/1/d/1SYhYjPr9qHPZWrDRyXgydfJPmV_eo1ef/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook.
- Khafagy, Fatma. 2005. "Honour Killing in Egypt." Conf. paper presented pada Expert Group Meeting on Violence Against Women, Vienna, Austria. Mei 17.
<https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/khafagy.honorcrimes.pdf>.
- Khedre, Farah. 2016. "Egyptian Girl's Tale: The 'Bawab' Symptom." Independent online media. Identity Magazine, Desember 21.
<https://identity-mag.com/egyptian-girls-tale-bawab-symptom/>.
- Labastie, Cecilia Vidotto. 2024. "Pyramids of Power: When Government-Issued Feminism Represses Grassroots Women's Movement in Egypt." *Institut Du Genre En Géopolitique*, April 26.
<https://igg-geo.org/en/2024/04/26/pyramids-of-power-when-government-is-sued-feminism-represses-grassroots-womens-movement-in-egypt/>.
- Larres, Klaus. 2021. *Dictators and Autocrats: Securing Power across Global Politics*. 1 ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003100508>.
- Martinelli, Sofia. 2022. *GENDER AND REVOLUTIONS IN TAHRIR SQUARE: SHAME AS A POLITICAL TOOL*. Insight No. 22. Reset DOC Insight Series. Reset Dialogues on Civilizations.
<https://www.thesquarecentre.org/2022/09/01/gender-and-revolutions-in-tahrir-square-shame-as-a-political-tool/>.
- Michaelson, Ruth. 2018. "Egyptian woman Amal Fathy jailed for sexual harassment video | Egypt | The Guardian." World News. *The Guardian*, September 29.
<https://www.theguardian.com/world/2018/sep/29/egypt-amal-fathy-jailed-sexual-harassment-video>.
- Nagel, Joane. 1998. "Masculinity and nationalism: gender and sexuality in the making of nations." *Ethnic and Racial Studies* 21 (2): 242–69.
<https://doi.org/10.1080/014198798330007>.
- Ngema, Nqobizwe Mvelo. 2023. "Regulation of Adultery (Zina) in the Context of Egyptian Human Rights Obligations." *Perspectives of Law and Public Administration* 12 (2): 256–61. <https://www.adjuris.ro/revista/>.
- Pleasance, Chris. 2021. "Egyptian Doctor Beaten and Thrown to Death from Balcony in Cairo 'for Inviting Man to Her Flat' | Daily Mail Online."

- Daily Mail UK* (United Kingdom), Maret 23.
<https://www.dailymail.co.uk/news/article-9392721/Egyptian-doctor-beaten-thrown-death-inviting-man-flat.html>.
- Reich, Wilhelm. 2023. *The Mass Psychology of Fascism*. Reprint/Paperback. Diterjemahkan oleh Vincent R Carfagno. WMR Press.
- Rofiah, Nur. 2023. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Afkaruna.id. Bandung.
[//eperpus.kemenag.go.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D41275%26keywords%3D](http://eperpus.kemenag.go.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D41275%26keywords%3D).
- Saad, Radwa, dan Sara Soumaya Abed. 2020. “A Revolution Deferred: Sexual and Gender-Based Violence in Egypt.” Dalam *Gender, Protests and Political Change in Africa*, disunting oleh Awino Okech. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46343-4_5.
- Scroope, Chara. 2017. “Egyptian - Religion.” Cultural Atlas, Januari 1.
<https://culturalatlas.sbs.com.au/egyptian-culture/egyptian-culture-religion>.
- Shafiek, Mina Kamal Asham. 2022. “Men’s Perception of Gender Roles in the Siwa Oasis, Egypt : Tradition and Gender Relation.” *觀光学* 27 (September): 25–35. <https://doi.org/10.19002/aa12438820.27.25>.
- Shutti, Grace. 2017. “Egyptian Judge Gives Four People Suspended Sentences over FGM Death | Egypt | The Guardian.” *The Guardian* (Egypt), Januari 18.
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/18/egyptian-judge-gives-four-people-suspended-sentences-over-fgm-death?utm_source=chatgpt.com.
- The Arab Republic of Egypt Presidency. 2019. “Honoring Egyptian Women and the Ideal Mothers Ceremony.” Presidency.eg.
<https://www.presidency.eg/en/قسم-الأخبار/الفعاليات-والمؤتمرات/احتفالية-المرأة-المصر/2019-ية/>.
- UN Women. 2021. “As More Families Report FGM Incidents in Egypt, Advocacy Intensifies, and a New Bill Seeks to Increase Penalties.” UN Women – Headquarters, Februari 5.
<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/2/feature--families-report-fgm-in-egypt-and-advocacy-intensifies>.
- UNFPA. 2016. *The Economic Cost of Gender Based Violence Survey Egypt 2015*. Egypt.
<https://egypt.unfpa.org/en/publications/economic-cost-gender-based-violence-survey-egypt-2015>.
- UNFPA, UNDP, UN Women, dan ESCWA. 2018. *Gender Justice & the Law: Egypt*. UNFPA.
<https://arabstates.unfpa.org/en/publications/gender-justice-law-egypt>.

- UNICEF. 2021. *Female Genital Mutilation in Egypt: Drivers, Decision-Making and Possibilities for Change*. United Nations Children's Fund (UNICEF). <https://www.unicef.org/media/128176/file/FGM-Egypt-2021.pdf>.
- United Nation. t.t. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women." un.org. Diakses 18 Juli 2025. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.
- Wahdan, Hend Mohamed. 2021. "Honour Crimes in Egypt. An Analysis of How Value Is Created through Language." *Young Anthropology* 3 (November): 32–36. <https://jps.library.utoronto.ca/index.php/ya/article/view/37819>.
- World Bank. 2024. *Compendium of International and National Legal Frameworks on Female Genital Mutilation/Cutting*. The World Bank Group. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/.../Compendium-FGM.pdf>.
- World Economic Forum. 2014. *Global Gender Gap Report 2014*. World Economic Forum.
- World Economic Forum. 2015. "Global Gender Gap Report 2015." World Economic Forum. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2015/>.
- World Economic Forum. 2018. *Global Gender Gap Report 2018*. World Economic Forum.
- World Economic Forum. 2024. "Global Gender Gap Report 2024." World Economic Forum. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/>.
- World Economic Forum. 2025. "Gender Gap Report 2025." World Economic Forum. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/>.
- Wynn, L. L., dan Saffaa Hassanein. 2017. "Hymenoplasty, Virginity Testing, and the Simulacrum of Female Respectability." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 42 (4): 893–917. <https://doi.org/10.1086/690918>.
- Younis, Dalia. 2023. "Medical Deception | Naja's Daughter Nearly Died Because of FGM Medicalization." Unicef Egypt. https://www.unicef.org/egypt/stories/medical-deception?utm_source=chatgpt.com.
- Zakariya, Jihan. 2019a. "Public Feminism, Female Shame, and Sexual Violence in Modern Egypt." *Journal of International Women's Studies* 20 (7). <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol20/iss7/8>.
- Zakariya, Jihan. 2019b. "Vulnerability, Resistance and Sexuality in Revolutionary Egypt." *Women's Studies International Forum* 77 (November): 102291. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102291>.

Ziegenhain, Patrick, dan Khaliunaa Enkhtaivan. 2024. "Democracy and Authoritarianism in Egypt Today." *Journal of Islamic World and Politics* 8 (1): 75–84. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v8i1.99>.